Digital Repository Universitas Jember

KEMENANGAN KELOMPOK ANTI KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM KEMERDEKAAN KALEDONIA BARU

VICTORY OF ANTI INDEPENCE GROUP IN THE NEW CALEDONIA INDEPENDENCE REFERENDUM

SKRIPSI

oleh
Akbar Nur Muchammad Rizal
NIM 130910101045

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020

Digital Repository Universitas Jember

KEMENANGAN KELOMPOK ANTI KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM KEMERDEKAAN KALEDONIA BARU

VICTORY OF IMIGRANT GROUP IN THE NEW CALEDONIA INDEPENDENCE REFERENDUM

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh
Akbar Nur Muchammad Rizal
NIM 130910101045

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya,.
2. Anggota keluarga, semua Guru-guruku dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis menjadi manfaat dan amal yang terus dicatat olehNya.
3. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

"Bacalah dan bakarlah semangatmu menulis, jika anda kurang membaca maka bahanmu kurang untuk menulis, karna membaca adalah bahan yang sangat membantu untuk kamu menulis. Maka Bacalah!."

(Soesilo Toer)[*]

[*] Sumber dari film dokumenter "Bumi Pramoedya: Cerita Soesilo Toer Dari Blora" https://www.youtube.com/watch?v=xdk3OlmyhzU, diakses pada 4 Juli 2019

Digital Repository Universitas Jember

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Nur Muchammad Rizal

NIM : 130910101045

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *"*Kemenangan Kelompok Anti Kemerdekaan Dalam Referendum Kemerdekaan Kaledonia Baru" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2020

Yang Menyatakan,

Akbar Nur Muchammad Rizal

NIM. 130910101045

Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

KEMENANGAN KELOMPOK ANTI KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM KEMERDEKAAN KALEDONIA BARU

VICTORY OF IMIGRANT GROUP IN THE NEW CALEDONIA INDEPENDENCE REFERENDUM

Oleh:

Akbar Nur Muchammad Rizal

(NIM 130910101045)

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Adhiningasih Prabhawati, S.Sos. M.Si.

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Kemenangan Kelompok Anti Kemerdekaan dalam Referendum Kemerdekaan Kaledonia Baru" karya Akbar Nur Muchammad Rizal telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 26 November 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Abubakar Eby Hara, M.A., Ph.D.
NIP 196402081989021001

Anggota I	Anggota II
Drs. Djoko Susilo, M.Si.	Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP 195908311989021001	NIP 196305261989022001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.
NIP 196002191987021001

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

“KEMENANGAN KELOMPOK ANTI KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM KEMERDEKAAN KALEDONIA BARU” ; Akbar Nur Muchammad Rizal; 130910101045; 2020; 75 halaman: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kaledonia Baru merupakan salah satu negara yang telah berada di bawah Koloni Perancis sejak tahun 1853. Negara ini memiliki suku asli dengan nama Kanak dan berbagai imigran yang bekerja untuk Perancis di tambang Nikel di Kaledonia Baru. Komposisi pendatang di negara ini hampir setengah dari jumlah orang Kanak. Pada tahun 1987, Kaledonia Baru ingin merdeka dari Prancis dengan melakukan referendum. Namun referendum tahun 1987 mendapat boikot dan penolakan dari pihak pro-kemerdekaan dan FLNKS (Front Pembebasan Sosialis Kanak) karena hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 98% penduduk menyatakan ingin tetap berada di bawah kepemimpinan Perancis dari hanya 59 % dari populasi yang berpartisipasi. Pada 2018, referendum kembali diadakan dengan hasil 53% pemilih mengatakan mereka ingin tetap dengan Prancis. Hal ini dapat dianggap sebagai pengaruh kehadiran pendatang terhadap hasil referendum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kemenangan kelompok anti kemerdekaan dalam Referendum Kemerdekaan di Kaledonia Baru tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data dan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil referendum di Kaledonia Baru yang memilih tetap bersama Perancis disebabkan oleh kuatnya pengaruh kelompok anti kemerdekaan yang berisi para imigran, mereka ingin menetap di Kaledonia Baru karena lapangan pekerjaan yang tersedia di negara tersebut berada di bawah kendali Perancis.

Digital Repository Universitas Jember

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahma dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KEMENANGAN KELOMPOK ANTI KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM KEMERDEKAAN KALEDONIA BARU"**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Ayah Nurchotib Sachaf dan Mama Nur Aini yang telah menjadi sumber semangat untuk terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, pengorbanan dan doa Ayah dan Mama yang tidak pernah terputus untuk saya hingga saat ini. Mohon maaf apabila hingga saat ini saya belum dapat membalas semua yang kalian berikan dan menjadi seorang yang kalian harapkan.
2. Bapak Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si. selaku dosen pembimbing utama. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Adhiningasih Prabhawati, S.Sos. M.Si. selaku dosen pembimbing anggota. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, waktu dan tenaga yang kalian luangkan kepada saya demi membantu mengarahkan skripsi saya untuk menjadi lebih baik.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama saya menjadi mahasiswa Universitas Jember.

Digital Repository Universitas Jember

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas bantuan dan kontribusi ilmu selama penulis menjalani studi.
6. Kerabat dan saudara saudara saya, terima kasih atas dukungan dan motifasi yang telah membuat hidup saya menjadi lebih baik.
7. Sahabat dan teman-teman saya, terima kasih atas kontribusi positif kalian selama saya menjadi mahasiswa Universitas Jember.

Terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan studi. Penulis sangat amat mengharapkan kritik dan saran dari kalian dalam membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi, dan semoga apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi seluruh pihak.

Jember, 27 November 2020

Penulis

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **1**
HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSEMBAHAN ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
SKRIPSI ..... **v**
PENGESAHAN ..... **vi**
RINGKASAN ..... **vii**
PRAKATA ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xiv**
BAB 1. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan **7**
1.2.1 Batasan Materi 7
1.2.2 Batasan Waktu 7
1.3 Rumusan Masalah **8**
1.4 Tujuan Penelitian **8**
1.5 Kerangka Dasar Pemikiran **8**
1.5.1 Konsep Imigran 9
1.5.2 Konsep Referendum 10
1.5.3 Model Perilaku Pemilih *(Voting Behaviour)* 11
1.6 Argumen Utama **15**
1.7 Metode Penelitian **15**
1.7.1 Metode Pengumpulan Data 16

Digital Repository Universitas Jember

1.7.2 Metode Analisis Data 17
1.8 Sistematika Penulisan 17
BAB 2. GAMBARAN KALEDONIA BARU 19
2.1 Demografi Imigran di Kaledonia Baru 22
2.1.1 Populasi Imigran dan Pengaruhnya di Kaledonia Baru 26
2.1.2 Pengaruh Kelompok, Etnis dan Wilayah atas Hasil Referedum 31
2.1.3 Politik Kelompok Imigran di Kaledonia Baru 36
2.2 Hubungan Bilateral Perancis dan Kaledonia Baru 39
2.2.1 Perjanjian Matignon 39
2.2.2 Perekonomian 40
2.2.3 Mempertahankan Status Quo 43
BAB 3. PERSIAPAN REFERENDUM 4 NOVEMBER 2018 46
3.1 Pengaruh Partai Politik di Kaledonia Baru Terhadap Kesepakatan Referendum 47
3.2 Penentuan Peserta Referendum Kaledonia Baru 52
BAB 4. ALASAN KEMENANGAN KELOMPOK ANTI KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM KEMERDEKAAN KALEDONIA BARU 56
4.1 Faktor Sosiologis 58
4.2 Faktor Psikologis 60
4.3 Faktor Rasional 63
BAB 5. KESIMPULAN 67
DAFTAR PUSTAKA 69

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Referendum Kaledonia Baru.....5
Tabel 2.1 Kaledonia Baru - Penduduk: Suku Kanak, Eropa dan lainnya 1887–2009.28
Tabel 2.2 Kaledonia Baru - Komposisi etnis dari populasi, 1996 dan 2009 (perbandingan terbatas).29

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kertas Pemilihan untuk Referendum.....31
Gambar 2.2 Pembagian Provinsi di Kaledonia Baru.....34
Gambar 2.3 Komposisi Etnis di Kaledonia Baru.....37
Gambar 4.1 Pertumbuhan Pekerja di Kaledonia Baru.....66

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR SINGKATAN

KJRI : Konsulat jenderal Republik Indonesia

FLNKS : Front Pembebasan Nasional Sosialis Suku Kanak atau *(Front de Libération Nationale Suku Kanak et Socialiste)*

RCPR *: Rally for Caledonia in the Republic*

PBB : Persatuan Bangsa-Bangsa

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

Ce : Caledonia Together

Uc : Caledonian Union atau Union Calédonienne

Pt : Parti Travailliste

Uni : Union Nationale Pour L'independance

RPCR : Rassemblement pour la Calédonie dans la République

FI : Front Indépendantiste

LESC : *la liste spéciale pour le référendum*

RIN : Rassemblement indépendantiste et nationaliste

RUU : Rancangan Undang-Undang

LESP : Liste électorale spéciale pour les élections provinciales

TPS : Tempat Pemungutan Suara

ISEE : *Institut de la statistique et des études économiques*

Digital Repository Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kaledonia Baru merupakan sebuah negara terletak di kawasan Pasifik atau Oseania dengan luas wilayah 18.275,5 Km2 daratan dan 300 Km2 perairan yang berpenduduk 268.767 jiwa. Status negara Kaledonia Baru adalah Wilayah Seberang Lautan *(Collectivité Sui Generis Territoriale)* Perancis di Pasifik sejak penandatanganan Perjanjian Nouméa *(Accord de Nouméa)* pada tahun 1998 (KJRI Noumea - Kaledonia Baru 2014). Wilayah yang sekarang bernama Kaledonia Baru merupakan wilayah yang ditempati oleh suku Suku Kanak yang secara resmi pada 24 September 1853. dianeksasi oleh Perancis sebagai tanah jajahan (Robertson, 2017: 1). Dari tahun 1887 hingga akhir Perang Dunia Kedua, Administrasi untuk Kebijakan Kolonial Perancis *(Régime de l'Indigénat*[1]*)* menempatkan Suku Kanak dibawah perlindungan Perancis dengan penempatan pasukan dan pemimpin yang dipilih dan dibayar oleh Pemerintah kolonial (Pitoiset, 2014: 38).

Pada masa kolonialis Perancis tahun 1975 muncul kelompok yang mendesak kemerdekaan Suku Kanak. Hal ini didasari bahwa Rezim Indegenat (*Régime de l'Indigénat)* merupakan upaya pembatasan Pemerintah Perancis terhadap suku dan etnis pribumi. Partai Pembebasan Suku Kanak *(Parti de Libération Suku Kanak)* terbentuk dan beranggotakan mayoritas mahasiswa radikal berhaluan kiri yang kemudian bersama dengan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan lainnya pada tahun 1984 berevolusi lebih besar menjadi Front Pembebasan Nasional Sosialis Suku Kanak atau *(Front de Libération Nationale Suku Kanak et Socialiste)* disingkat FLNKS pada tahun 1976 (Robertson, 2017: 1). Kelompok ini selain mengklaim sebagai partai pro-kemerdekaan, FLNKS sebagai kelompok pro-kemerdekaan Kaledonia Baru mendirikan Pemerintah independen sementara pada tahun 1984, hal ini menyebabkan adanya bentrokan

[1] Rezim Indigénat merupakan Undang-undang Luar Biasa dan serangkaian praktik yang digunakan di wilayah kekaisaran kolonial Perancis kedua dari pertengahan abad ke - 19 sampai setelah Perang Dunia Kedua (Axl.cefan. 2013. Code de l'indigénat. Diakses dari : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/indigenat_code.htm. Pada 21 Januari 2020).

Digital Repository Universitas Jember

kepentingan dengan *Rally for Caledonia in the Republic* (RCPR[2]) (Burhanuddin, 2015: 241).

Perbedaan kepentingan diantara kedua kelompok ini menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Masa konfrontasi berlangsung pada tahun 1984 hingga tahun 1988 yang menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satunya yakni pemberontakan kelompok pro kemerdekaan pada tahun 1988 dengan menyandera 23 orang warga negara Perancis. Seperti yang di beritakan Los Angeles Times, untuk melawan kelompok pro kemerdekaan itu, Pemerintah Perancis mengeluarkan misi penyelamatan dengan nama "Operasi Victor" dengan beranggotakan 60 pasukan elit Perancis menyerbu lokasi penyanderaan. diberitakan seluruh sandera dapat dibebaskan dengan selamat sebanyak 15 orang dari kelompok pro kemerdekaan dan dua polisi Perancis tewas dalam sergapan tersebut (Los Angeles Times, 1988). Pada tahun 1988, untuk meredam keadaan dalam negeri yang kurang kondusif, kelompok anti kemerdekaan dengan didampingi oleh Pemerintah Perancis menegosiasikan Perjanjian Matignon dengan kelompok pro kemerdekaan[3].

Kelompok pro kemerdekaan (FLNKS) di Kaledonia Baru, melihat Suku Kanak sebagai suku asli yang di diskriminasi oleh imigran Eropa, mereka juga memperjuangkan hak-hak Suku Kanak sebagai korban sejarah untuk merdeka[4]. Masa panjang program imigrasi berakibat adanya perbedaan budaya dan tradisi juga menjadi alasan yang menyebabkan sejumlah pemberontakan etnis (Pitoiset, 2014: 38). Hal ini membuat Pemerintah Perancis mulai lebih berhati-hati

---

[2] Kelompok ini merupakan anti-kemerdekaan yang kemudian mengadakan konfrontasi dengan kelompok pro-kemerdekaan (Sumber : CIA. 2019. Political Parties and Leader : New Caledonia. Diakses dari : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/315.html. Pada 4 April 2020)

[3] isi perjanjian Matignon tentang pembagian kekuasaan dan pembangunan regional yang bersifat universal di Kaledonia Baru (Sumber : Pitoiset, A. 2014. New Caledonia. Maison De La Nouvelle-Calédonie. Diakses dari : http://www.mncparis.fr/ulftp/mnc_general_uk.pdf Pada 2 Desember 2018.

[4] Maksud dari korban sejarah adalah, Suku Kanak menganggap bahwa terjadinya pertumpahan darah saat kolonialisasi Perancis, diskriminasi sosial hingga pembatasan hak-hak politik, membuat Suku Kanak menjadi komunitas yang terasingkan. (Sumber Robertson, S. 2017. The New Caledonian Referendum on Independence Part 1 : Historical Origins. Brief, 40(Building 20 Years of The Stat, Society,& Goverment in Melanesia Program), 2. Diakses dari : http://bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2017-12/dpa_ib2017_40_robertson.pdf. Pada 2 Desember 2018)

Digital Repository Universitas Jember

melakukan migrasi sebagai cara untuk memperkuat kedaulatan dan kepentingan Perancis atas wilayah Kaledonia Baru pada saat wilayah lain di Pasifik Selatan sedang bersiap-siap untuk merdeka (Robertson, 2017: 1). Sebagai dalih modernisasi, migrasi menjadi sebuah proses transformasi sosial dan ekonomi yang telah berlangsung di wilayah jajahan Perancis, mereformasi struktur sosial wilayah kolonial dengan memanfaatkan migrasi tenaga kerja untuk menekan angka ketidaktahuan dan keterbelakangan partisipasi politik (Naylor, 2018: 20). Dampaknya, selama 25 tahun sistem partai politik di Kaledonia Baru didominasi oleh partai anti-kemerdekaan hingga tahun 2004 (Burhanuddin, 2015: 54).

Selain konflik multiras antara Suku Kanak dan imigran, pembahasan utama yang juga menjadi landasan atas perlawanan dari kelompok pro kemerdekaan adalah status Kaledonia Baru sebagai produsen nikel terbesar ketiga di dunia (CNN Indonesia, 2018). Namun hal tersebut menyebabkan ketimpangan kesejahteraan akibat eksploitasi tambang nikel yang dilakukan oleh Pemerintah Perancis. Nikel ini merupakan salah satu dasar atas keinginan kemerdekaan, karena status Kaledonia Baru sebagai salah satu negara koloni Perancis yang mana FLNKS sebagai kelompok pro kemerdekaan berharap Kaledonia Baru mengolah secara mandiri atas kekayaan nikel di negara ini.

Atas dasar beberapa sebab yang telah disebutkan (konflik multiras imigran, pribumi, dan ekonomi yakni tambang nikel), FLNKS berupaya mencari dukungan untuk pengakuan. FLNKS mengajak negara-negara Pasifik termasuk Australia dan Selandia Baru untuk membantu Kaledonia Baru agar diakui oleh PBB. Hal ini pastinya membuat Perancis harus mengakui kedaulatan Kaledonia Baru dan memberikan hak-hak penentuan nasib kepada Suku Kanak sebagaimana seperti yang dijelaskan di Deklarasi PBB tahun 1960. Ketentuan tersebut berisi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara jajahan dan untuk masyarakat terjajah diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri (Robertson, 2017: 2).

Digital Repository Universitas Jember

Rancangan referendum kemerdekaan Kaledonia merupakan hasil dari perjanjian *Accord de Nouméa*[5]*(*Australian Indigenous Law Reporter, 2002) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1998. Perjanjian disahkan melalui referendum oleh 72% dari populasi Kaledonian dan telah disetujui oleh kelompok pro kemerdekaan dan anti kemerdekaan serta Pemerintah Perancis. Pada perjanjian tersebut membahas pelaksanaan referendum kemerdekaan Kaledonia kemudian disahkan untuk diselenggarakan antara tahun 2014 hingga tahun 2018 (Pitoiset, 2014: 54). Para petinggi Kaledonia Baru dan Perdana Menteri Mannuel Valls telah melakukan pertemuan untuk membahas referendum kemerdekaan Kaledonia Baru yang dilaksanakan paling lambat pada bulan November 2018 (Pireport.org, 2016).

Sebagai bahan perbandingan dalam studi ini, perlu untuk memperhatikan negara di Eropa lainnya yang melakukan kolonisasi, yakni Perancis dan Inggris, kedua negara ini memiliki koloni di berbagai belahan dunia, baik di benua Afrika hingga Asia. Untuk Inggris, terdapat istilah Persemakmuran *(Commonwealth)* yang berasal dari abad XV, secara harfiah berarti untuk kebaikan atau kemakmuran bersama. Semua Negara Anggota Persemakmuran *(Commonwealth)* tersebut menganggap Ratu Inggris yaitu Ratu Elizabeth II, sebagai ketua Persemakmuran. Sebagian besar anggotanya adalah Republik, dan sisanya telah mempunyai Monarki tersendiri. Namun Inggris juga melakukan proses referendum atas negara yang ingin memerdekakan diri sebagai negara "persemakmuran", contohnya yakni Skotlandia, yang merupakan salah satu negara anggota persemakmuran monarki Inggris Raya. Skotlandia menggelar referendum dengan pilihan apakah rakyat Skotlandia setuju untuk memisahkan diri dari persemakmuran Inggris atau tidak, hasilnya 55,3% hasil referendum tetap ingin menjadi bagian dari Inggris pada tahun 2014 (BBC, 2014).

[5] Perjanjian yang berisi janji Pemerintah Republik Perancis untuk memberikan kekuasaan politik kepada Kaledonia Baru dan penduduk aslinya, suku Kanak, hingga wilayah tersebut dapat memutuskan pada tahun 2018 apakah tetap ingin menjadi wilayah seberang laut Perancis atau menjadi negara merdeka. (Sumber : Australian Indigenous Law Reporter. 2002. "Noumea Accord - Digest" . diakses dari : http://www.austlii.edu.au/au/journals/AILR/2002/17.html. Pada 8 Februari 2020)

Digital Repository Universitas Jember

Seperti halnya Inggris, Perancis juga merupakan negara yang melakukan koloni di berbagai belahan dunia, hal ini dapat dibuktikan dengan wilayah Afrika yang hampir secara keseluruhan dikoloni oleh Perancis. Perancis mengalami perlawanan dan kegagalan yang besar dari negara yang di koloni di Afrika, contohnya yakni Pemberontakan di Aljazair pada tahun 1954. Perancis juga memiliki jajahan yang terkenal, semuanya di Benua Amerika, antara lain Guyana Perancis, Guadeloupe, dan Martinik. Sementara negara jajahan minor, seperti Reunion, Mayotte, Polinesia Perancis, Saint Pierre dan Miquelon, Wallis dan Futuna, Saint Martin, Saint Barthélemy, Kaledonia Baru, Antartika Perancis, dan Pulau Clipperton.

Setelah perbandingan antara Perancis dan Inggris, dapat dipahami bahwa Kaledonia Baru dapat dikatakan sebagai negara pertama yang melakukan referendum pasca perubahan sistem Pemerintahan Perancis pada tahun 1958. Tentu hasil dari referendum ini memiliki konsekuensi yang besar, jika bertahan dengan Pemerintah Perancis maka memiliki keuntungan dalam sektor pemerintahan, ekonomi dalam negeri, dan pertahanan nasional yang secara penuh diawasi dibawah Pemerintah Perancis. Namun, seperti negara merdeka lainnya, jika Kaledonia Baru memilih merdeka maka seluruh urusan perihal negara dikelola secara mandiri oleh masyarakat Kaledonia Baru.

Pada tanggal 4 November 2018, referendum kemerdekaan Kaledonia Baru dilaksanakan, pengambilan suara dilakukan serentak di tiga provinsi yang ada di Kaledonia Baru. Hasil referendum kemerdekaan Kaledonia Baru menunjukkan hasil yang menarik, terdapat 174.165 pemilih yang terdaftar di seluruh wilayah Kaledonia Baru, dengan penggunaan hak pilih sebesar 141.009 atau 81,01% dari total pemilih yang terdaftar. Hasil akhir referendum tersebut adalah sebanyak, 60.199 suara atau 43,33% memilih untuk memerdekakan diri dan sisanya 78,734 suara atau 56,67% memilih bertahan dengan Perancis (Elections-nc.fr, 2018). Berikut hasil perbandingan suara ditiap Provinsi di Kaledonia Baru dalam bentuk tabel:

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 1.1 Hasil Referendum Kaledonia Baru

	Pemilih	Merdeka		Bertahan	
		Suara	%	Suara	%
Provinsi Kepulauan	13.095	**10.631**	**82,18**	2.305	17,82
Provinsi Utara	34.445	**25.747**	**75,83**	8.208	24,17
Provinsi Selatan	93.559	23.821	25,88	**68.221**	**74,12**
Total	141.099	60.119		**78.734**	

(Sumber: Election NC. 2018. Les résultats du référendum 2018. Diakses dari https://www.elections-nc.fr/elections-2018-2019/referendum-2018/les-resultats. Pada 19 Oktober 2019)

Masyarakat di Provinsi Selatan memilih sikap berbeda dengan Provinsi Utara dan Provinsi Kepulauan dalam Referendum Kemerdekaan Kaledonia Baru. Melihat hasil Referendum Kaledonia Baru tersebut ada keterkaitan jumlah penduduk yang berdampak pada hasil akhir referendum, dapat dikatakan bahwa keunggulan suara di Provinsi Selatan memiliki jumlah lebih besar dari Provinsi Utara dan Provinsi Kepulauan. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kaledonia Baru memilih bertahan dalam referendum tersebut.

Hasil referendum yang dilaksanakan di tiga provinsi memiliki perbedaan hasil yang signifikan. Penulis melihat keputusan bertahan oleh masyarakat Kaledonia Baru disebabkan oleh kondisi struktur sosial yang unik yaitu kondisi politik dalam negeri dan adanya pengaruh secara historis Pemerintah Perancis dalam referendum Kaledonia Baru. Kondisi unik tersebut seperti segregasi sosial, struktur demografi dan fenomena imigran yang telah memberikan pengaruh dalam perolehan suara dalam referendum tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan negara Kaledonia Baru terpecah karena perbedaan tujuan dan cita-cita sebagai satu kesatuan bangsa.

Penjelasan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan bertahan masyarakat Kaledonia Baru kepada Pemerintah Perancis mengingat

Digital Repository Universitas Jember

secara historis dengan adanya perjanjian *Accord de Nouméa* pada tahun 1998 merupakan titik awal upaya perjuangan kemerdekaan penduduk Kaledonia Baru. Oleh karena itu, penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **"KEMENANGAN KELOMPOK ANTI KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM KEMERDEKAAN KALEDONIA BARU"**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah diperlukan pembatasan masalah untuk meperjelas ruang lingkup materi yang menjadi inti dari pembahasan pada penelitian. Batasan dalam ruang lingkup penelitian berisi hal-hal yang bersifat inti yang dibahas oleh penulis sehingga menjadikan penulisan lebih fokus dan mencapai target penelitian. Dalam karya ilmiah ini ruang lingkup pembahasan dibagi dalam batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi digunakan untuk membatasi objek pembahasan yang dianalisa. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian tetap berada dalam fokus pembahasan supaya tidak menyebar dan berkembang keluar dari pokok pembahasan. Batasan materi yang digunakan berdasar dari peristiwa dan fakta yang relevan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, fokus penelitian membahas mengenai alasan kemenangan kelompok memilih bertahan dalam status wilayah administratif Perancis.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang ditentukan dalam penelitian ilmiah ini dimulai dari tahun 2014 hingga pelaksanaan referendum pada tahun 2018. Pada tahun 2014 merupakan tahun awal persiapan diadakannya referendum hasil kesepakatan pada tahun 1998 dengan dasar *Accord de Nouméa*. Tahun 2018 merupakan masa dimana proses pelaksanaan referendum berlangsung hingga menghasilkan keputusan bertahannya Kaledonia Baru sebagai negara koloni Perancis.

Digital Repository Universitas Jember

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah karya ilmiah bertujuan untuk mengubah permasalahan dalam bentuk yang lebih terfokus. hal ini untuk mempermudah proses menganalisa suatu permasalahan terhadap sebuah objek yang diteliti. Rumusan masalah tidak terpisahkan dengan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah (Priyono, 2016: 51). Oleh karena itu, penulis menarik pertanyaan dasar sebagai topik pembahasan yakni:

"Mengapa Kelompok Anti Kemerdekaan di Kaledonia Baru dapat Memenangkan Referendum Kemerdekaan?"

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor kemenangan kelompok anti kemerdekaan yang berisi para imigran pada Referendum Kemerdekaan di Kaledonia Baru tahun 2018.

1.5 Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran harus terdapat dalam setiap penulisan karya ilmiah, karena kerangka dasar pemikiran menunjukkan posisi penulis dari sudut pandangan mana dia melihat pada apa yang ditelitinya. Kerangka pemikiran harus terdapat dalam setiap penulisan karya ilmiah.

Kerangka dasar pemikiran dapat berupa konsep-konsep atau teori yang disusun secara sistematis untuk membantu penulisan dan pemahaman analisis yang dilakukan. Konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep adalah suatu kata yang melambungkan gagasan, bukan sesuatu hal asing dan digunakan sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-ciri relevansinya bagi kita (Mas'oed, 1990: 219). Sedangkan menurut Robert K. Yin (2011: 23) konsep-konsep dalam suatu kerangka pemikiran dapat menunjukkan atau memuat suatu abstraksi teori yang kemudian dapat membantu menganalisis fenomena yang ada.

Digital Repository Universitas Jember

American Herigate Dictionary mendefinisikan teori sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diterapkan secara realtif pada berbagai situasi khususnya terdiri dari sebuah sistem asumsi, prinsip-prinsip yang diterima dan peraturan yang berguna untuk menganalisis, memprediksi atau menjelaskan sifat atau tingkah laku suatu fenomena tertentu (Spring D. & Wolinsky Y, 2004: 4).

Berlandaskan itulah maka penulis disini membahas konsep imigran dan konsep referendum, serta menggunakan konsep Model Perilaku Pemilih *(Voting Behaviour)* untuk menjawab rumusan masalah.

1.5.1 Konsep Imigran

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, tercantum makna dari Imigran memiliki arti orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara (KBBI, 2016). Proporsi imigran dari satu negara ke negara lain sangat bervariasi. Beberapa negara imigran melebihi setengah populasi, sementara di beberapa negara lain di bawah 0,1% (Pison, 2014).

Imigran dapat pindah ke negara lain karena sejumlah alasan. Beberapa dari mereka pindah bersama keluarga atau karena alasan ekonomi, terdapat pula dengan alasan pendidikan dan banyak juga imigran yang kembali ke negara asal setelah beberapa tahun. Banyak orang bermigrasi karena rumah mereka menjadi berbahaya atau sulit untuk ditinggali. Para imigran ini dapat memiliki alasan untuk melarikan diri dari kerusuhan, kelaparan, kekeringan, atau keruntuhan ekonomi di negara asalnya. Namun terdapat pengecualian dan pembeda antara imigran dan pengungsi, apabila mereka dalam bahaya, konflik atau penganiayaan yang terjadi di negara yang mereka datangi, mereka tidak dianggap sebagai pengungsi (Eldridge, 2016).

Perbedaan ini penting, karena konvensi internasional pada tahun 1951[6] menguraikan hak-hak tertentu untuk orang yang dianggap sebagai pengungsi,

[6] Konvensi yang berisi mengenai status Pengungsi, Konvensi ini di sahkan oleh PBB pada tahun 1951 (Sumber : UNHCR. 2017. Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi. Diakses

Digital Repository Universitas Jember

sedangkan migran tidak memiliki hak seperti itu. Pengungsi dilindungi dari deportasi oleh negara yang ditempati oleh pengungsi atau dikembalikan ke situasi yang dapat mengancam kehidupan mereka. Mereka harus diberikan akses ke layanan sosial dan untuk diintegrasikan ke dalam masyarakat negara baru mereka. Para migran tunduk pada hukum dan prosedur imigrasi suatu negara dan dapat ditolak atau dideportasi kembali ke tanah air mereka (Eldridge, 2016).

1.5.2 Konsep Referendum

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, tercantum makna dari referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat) (KBBI Daring). "Referendum" adalah istilah umum yang merujuk pada ukuran yang muncul pada surat suara. Pada referendum, masyarakat memiliki hak pilih dan dimintai pendapat. Sebuah referendum dianggap mengikat apabila Pemerintah harus mengikuti seluruh jawaban rakyat yang ada dalam hasil referendum.

Referendum dapat diartikan sebagai lembaga untuk meminta persetujuan rakyat secara langsung tentang suatu masalah (Ibrahim, 1984: 477). Dalam kasus demokrasi langsung melalui perangkat seperti referendum, partisipasi rakyat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan karena pada dasarnya masyarakat berhak berpartisipasi dalam membuat keputusan penting untuk menyusun kehidupan mereka dan menentukan nasib mereka (Heywood, 2002: 69-70). Dapat dikatakan bahwa langkah untuk mencapai keputusan, referendum dapat dijadikan sebagai media untuk menentukan nasib suatu negara, sebagai contoh Referendum Kemerdekaan Kaledonia Baru. Referendum ini berkaitan dengan pilihan rakyat Kaledonia Baru tentang menentukan nasib mereka untuk merdeka sebagai sebuah negara yang sah dan berdaulat atau ingin tetap masuk dalam wilayah administratif Perancis.

---

dari https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf. Pada 7 September 2019.

Digital Repository Universitas Jember

1.5.3 Model Perilaku Pemilih *(Voting Behaviour)*

Demi menganalis keputusan bertahan masyarakat Kaledonia Baru dibawah status aneksasi Perancis saat referendum, penulis menggunakan konsep Perilaku Pemilih. Konsep ini merupakan alat analisis yang tepat untuk mengetahui alasan masyarakat Kaledonia Baru memilih bertahan dalam referendum kemerdekaan Kaledonia Baru.

Konsep Perilaku Pemilih menurut Asfar (2006:45) memiliki tiga model untuk menjelaskan perilaku para pemilih dalam kasus ini, yaitu model Sosiologis, Psikologis, dan model Pilihan Rasional. Model Sosiologis memiliki spesifikasi yang memiliki kesamaan seperti agama, etnisitas, dan kelas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi komponen penting. Berikutnya model Psikologis, dalam menentukan pilihan untuk menjadi pemimpin berdasarkan kemampuan pada daya tarik kepemimpinan yang dimiliki oleh calon pemimpin serta menentukan dirinya sebagai calon dalam sebuah kelompok atau partai. Selanjutnya model Pilihan Rasional, pemilih lebih memperhatikan faktor-faktor calon dengan memperhatikan kapabilitas dan kemampuan dari calon pemimpin atau partai untuk merubah kehidupan pemilih tersebut (Trihartono, 2014: 58-59). Berikut ini penjelasan lebih mendalam mengenai ketiga model Perilaku Pemilih.

a. Model Sosiologis

Model sosiologis berasumsi bahwa perilaku pemilih dapat dilihat melalui karakteristik sosiologis para pemilih, yakni agama, kelas sosial, dan kelompok etnis (Mujani dkk, 2012: 6). Model ini melihat kecenderungan pemilih memilih berdasar pada keyakinan bahwa pilihan tersebut memiliki kesamaan sosiologis dengan pemilih sehingga pemilih memiliki potensi untuk memilih calon yang dapat memperjuangkan kepentingan dan perbaikan kelas sosial mereka.

Kemampuan atau potensi calon dalam mengusung kepentingan dan perbaikan kelas sosial dapat dilihat juga dari sisi historis dan citra yang terbentuk. Maka dari itu, persepsi atau sudut pandang tentang posisi kelas sosial menjadi salah satu persoalan penting dalam pemilihan umum (Mujani dkk, 2012: 10-11).

Digital Repository Universitas Jember

Karena pada dasarnya masyarakat berharap dengan pemilihan umum dapat merubah nasib mereka.

Model sosiologis lainnya yang juga penting dalam mempengaruhi keputusan pemilih unutk memilih adalah platform yang sama (Mujani dkk, 2012: 14). Sebagai contoh, seorang pemilih Islam cenderung memilih calon pemimpin yang memiliki latar belakang platform Islam dibandingkan agama lain, atau seorang pemilih Suku Jawa cenderung memilih calon pemimpin yang memiliki latar belakang platform dengan lingkungan daerah yang sama yakni jawa dibandingkan dengan Suku Non-Jawa.

b. Model Psikologis

Model psikologis menjelaskan tentang partisipasi seseorang dalam pemilihan umum disebabkan adanya ketertarikan dengan politik, memiliki perasaan dekat dengan kelompok-kelompok berbasis politik tertentu (partai), memiliki informasi yang kredibel untuk menentukan keputusan pilihan, cenderung merasa bahwa dirinya memiliki suara yang harus digunakan dan berarti, serta memiliki keyakinan bahwa suaranya memiliki andil untuk memperbaiki keadaan (Mujani dkk, 2012: 22-24).

Dalam mengikuti pemilihan umum, keinginan seseorang dalam berpartisipasi cenderung karena adanya kesadaran terhadap kemauan untuk berpartisipasi menggunakan suaranya. Kemauan berpartisipasi merupakan bentuk keterlibatan dalam politik. Keterlibatan politik terdiri dari informasi atau pengetahuan politik *(political interest),* merasa suara yang dimiliki memiliki pengaruh terhadap perubahan *(internal efficacy),* dan identitas partai *(partisanship)* (Mujani dkk, 2012: 22).

Informasi atau pengetahuan politik yang dimiliki oleh seseorang merupakan hal-hal yang mencakup tentang politik dan kepentingan publik. Pemilih memiliki informasi yang cukup terkait dengan isu publik cenderung memiliki kemampuan untuk memutuskan pilihan dalam pemilihan umum. Dengan kesadaran informasi dan pengetahuan politik, pemilih juga didukung oleh

Digital Repository Universitas Jember

kesadaran bahwa dirinya mampu memahami, menentukan, memutuskan, serta merasa yakin dalam menyikapi masalah publik sehingga pemilih memiliki optimisme tinggi terhadap suara yang dimilikinya dalam membentuk perubahan.

Partisanship atau identitas partai juga memiliki kontribusi dalam partisipasi politik, yang mana keadaan psikologis seseorang yang merasa memiliki keterikatan dan siap mendukung setelah mengidentifikasikan dirinya masuk dalam klasifikasi partai tersebut. Perasaan yang menjadi bagian dari partai membuat partisan cenderung menggunakan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (Mujani dkk, 2012: 25).

Model Psikologi menggambarkan bahwa seseorang belum tentu menggunakan hak suaranya dan menentukan pilihannya berdasarkan pada aspek-aspek sosiologis semata. Maka dari itu, secara instan faktor sosiologis tidak lepas dari faktor psikologis. Model psikologis menjelaskan perilaku pemilih dengan mengidentifikasi diri dengan partai, opini publik, dan opini kapabilitas para calon yang bersaing dalam pemilihan umum.

c. Model Pilihan Rasional

Model rasional jika dianalogikan, pemilihan umum merupakan aksi, kejadian atau peristiwa keberlangsungan Pemerintah sebagai reaksi. Model rasional lebih menekankan pada kapabilitas partai atau calon pejabat dalam memenuhi dan memperbaiki harapan pemilih. Seorang pemilih dalam menentukan pilihannya mempertimbangkan keberlangsungan hidupnya ketika berada dibawah kepemimpinan suatu partai atau calon pejabat dengan membandingkan; yang sebelumnya (retrospektif) dan yang datang (prospektif) (Mujani dkk, 2012: 33).

Jika keadaan ekonomi dalam negeri dibawah Pemerintah sekarang berlangsung dengan baik dan memiliki peningkatan dari pada periode sebelumnya, maka pemilih memberikan penghargaan *(reward)* dengan memberi kepercayaannya kembali memilih partai atau pejabat Pemerintah sekarang. Namun berbanding terbalik, apabila kondisi dalam negeri baik dalam sektor politik maupun ekonomi menjadi lebih buruk dari sebelumnya, maka pemilih

Digital Repository Universitas Jember

tidak lagi memiliki kepercayaan sehingga tidak lagi memilih partai atau pejabat Pemerintah tersebut (Mujani dkk, 2012: 33).

Model pilihan rasional mengakui bahwa sebagian besar pemilih bukan pengidentifikasi yang kuat dan tidak memiliki hubungan nyata dengan partai politik. Mereka pada dasarnya tidak selaras dan akibatnya, seperti yang pernah dikatakan Ivor Crewe, "suara siap diperebutkan". Pemilih kemudian memutuskan cara memilih berdasarkan serangkaian penilaian yang dibuat tentang beberapa faktor yang relevan. Jadi, perilaku memilih dipengaruhi oleh kombinasi dari rekam jejak partai, manifesto pemilihan, pemimpin partai dan pemain partai kunci.

Hal ini berarti bahwa pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan kelas, usia, etnis atau jenis kelamin atau identifikasi partai tetapi pada siapa yangmenguntungkan mereka dan keluarga mereka. Faktanya, para ilmuwan politik Butler dan Stokes mengidentifikasi apa yang membuat suatu masalah menonjol, yang berarti apa yang membuat sesuatu menjadi sesuatu yang benar-benarmempengaruhi pemungutan suara. Mereka mengidentifikasi empat kondisi - yaitu bahwa pemilih harus mengetahui masalah, pemilih harus memiliki pendapat tentang suatu masalah, pemilih harus mendeteksi perbedaan antara pihak-pihak dalam masalah ini, dan pemilih harus benar-benar mengubah preferensi mereka menjadi suara yang sebenarnya untuk partai yang pandangannya pada masalah perkiraan untuk mereka sendiri.

Meskipun ketiga model perilaku pemilih ini digunakan untuk menganalisa pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap partai atau calon pemimpin, namun penulis menginterpretasikan model perilaku pemilih ini dapat juga digunakan untuk menganalisa dan menjelaskan partisipasi masyarakat Kaledonia Baru memilih bertahan dengan Perancis dalam referendum kemerdekaan Kaledonia Baru 2018. Penggunaan konsep model perilaku pemilihdapat mengetahui alasan-alasan masyarakat Kaledonia Baru memilih bertahan dengan

Digital Repository Universitas Jember

Perancis, hal ini selaras dengan pilihan masayarakat yang dilatarbelakangi oleh berbagai isu.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama adalah dugaan atau jawaban sementara dari analisa permasalahan penelitian. Dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan konsep yang telah dipaparkan, maka argumen utama penulis adalah sebagai berikut:

Kemenangan ini karena kelompok anti kemerdekaan yang berisi para imigran, tidak ingin kehilangan pekerjaan di Kaledonia baru dan mereka ingin sektor pekerjaan disana tetap dikuasai oleh Perancis. Kelompok anti kemerdekaan ini beranggapan bahwa dengan memilih bertahan dengan Perancis maka keadaan ekonomi dan sosial mereka akan terjamin. Hal ini juga menjadi pertimbangan karena adanya ketidak-pastian nasib apabila Kaledonia Baru merdaka. Selain itu, ketidak-pastian tentang kondisi sosial dan politik pasca kemerdekaan menjadi alasan tersendiri bagi kelompok imigran. Hal ini tentunya berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang notabenenya adalah imigran. Kesetaraan masih belum terjamin apabila Kaledonia Baru merdeka.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah untuk memperoleh informasi dan menganalisisnya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam karya ilmiah adanya metode penelitian menjadikan karya tulis ilmiah lebih terstruktur dengan baik. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi data yang dikumpulkan, serta dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah. Tujuan rancangan penelitian adalah melalui penggunaan metode penelitian yang tepat, dirancang pada kegiatan yang dapat memberikan jawaban yang diteliti terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Digital Repository Universitas Jember

Metode berkenaan dengan prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional diperoleh. Pendekatan keilmuan dari sebuah penelitian menjadi penting, sehingga penemuan esensi dari sebuah fenomena hubungan internasipnal bisa di ketahui. Pendekatakan keilmuan sangat berkaitan dengan metode. Definisi metode menurut The Liang Gie, yaitu

> "....cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala pada ujung awalnya. Ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya untuk meluruskan kebenaran dari pertanyaan-pertanyaan yang disebut mengenai suatu gelaja tersebut." (The Liang Gie, 1997: 328)

Berdasarkan definisi metode menurut The Liang Gie, maka metode penelitian menjadi acuan penulis untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan sehingga didapatkan pola yang berkaitan dengan jawaban permasalahan yang diajukan. Metode penelitian mencakup dua tahap yakni pengumpulan data dan analisis data.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Data merupakan dasar dari suatu penelitian.Hasil penelitian yang valid diperoleh apabila data-data yang dikumpulkan valid dan kredibel. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai sumber karena data-data yang didapat dan dikumpulkan oleh penulis tidak diperoleh langsung dari sumbernya dan semua data tersebut berupa literur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Dalam mendapatkan data-data tersebut, penulis melakukan penelitian dibeberapa tempat, antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember

Sedangkan penulis mendapatkan sumber-sumber informasi dari:

1. Buku
2. Surat Kabar

Digital Repository Universitas Jember

3. Internet

1.7.2 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013: 248).

Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan fakta-fakta dengan memberi data yang akurat dan tepat. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian dilakukan dengan menganalisis fenomena hubungan internasional pada Kemenangan Kelompok Anti Kemerdekaan DALAM REFERENDUM KEMERDEKAAN KALEDONIA BARU

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan.

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Gambaran Kaledonia Baru.

Bab ini mencakup pejelasan mengenai sejarah singkat Kaledonia Baru, kemudian dilanjutkan dengan dinamika hubungan Pemerintah Perancis dan Kaledonia Baru. Bab ini juga berisi awal mula diadakannya referendum kemerdekaan Kaledonia Baru.

Bab 3. Dinamika Politik Menuju Referendum.

Bab ini membahas referendum kemerdekaan Kaledonia Baru, mulai dari penjelasan awal terjadinya hingga hasil referendum. Bab ini pula berisi penjelasan dinamika Kaledonia Baru menuju referendum.

Bab 4. Alasan Kemenangan Kelompok Anti Kemerdekaan Dalam

Digital Repository Universitas Jember

Referendum Kemerdekaan Kaledonia Baru.

Bab ini membahas hal-hal yang menjadi faktor masyarakat Kaledonia Baru memutuskan untuk tetap berada dibawah naungan Pemerintah Perancis dengan hasil kelompok Imigran yang memenangkan referendum dengan menggunakan kacamata analisis dari konsep yang ditentukan.

Bab V. Penutup.

Bab ini merupakan bagian akhir dan penutup dari karya tulis ilmiah ini yang memuat kesimpulan berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 2. GAMBARAN KALEDONIA BARU

Penjelajah Inggris James Cook "menemukan" wilayah ini yang terlihat mirip dengan tanah kelahirannya Caledonia atau Skotlandia. Pemerintah Napoleon III Perancis kemudian secara resmi mengambil alih wilayah *Nouvelle Calédonie*[7] di tahun 1853. Setelah sempat menjadi koloni penjara di tahun 1864 hingga tahun 1879, Perancis kemudian mendatangkan penduduk kolonis Eropa, mengeksplorasi sumber daya mineral, dan mendatangkan buruh pekerja asing, termasuk dari Indonesia pada tahun tahun 1874. Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat menempatkan 600.000 tentara dan seusai perang, Perancis juga menjadikan *Nouvelle Calédonie* sebagai satu dari 12 *Territoire d'Outre Mer* atau Wilayah Seberang Lautan-nya pada tahun 1946. Kini *Nouvelle Calédonie* merupakan wilayah Perancis dengan hak otonomi khusus (*sui generis collectivity)* dengan pembagian hak kedaulatan. *Nouvelle Calédonie* merupakan pulau utama yang bergunung-gunung (Gunung Panie dan Gunung Humbolt lebih dari 1.600 mdpl[8]), dengan wilayah pulau-pulau Atol di utara dan selatannya, serta Kepulauan Loyalty di timur yang datar dan berbatu karang. Kelompok terbesar penduduk adalah etnis pribumi Suku Kanak (Melanesia) dan penduduk keturunan Eropa.

Selain itu, etnis pendatang lainnya yakni etnis Indonesia sekitar 2,5% populasi yang kebanyakan merupakan keturunan para pekerja yang didatangkan Perancis dan Belanda dari tanah Jawa. Untuk masyarakat pribumi, etnis Suku Kanak berdasarkan pada klan atau marga yang meskipun berasal dari nenek moyang yang sama, namun karena pola hidup berpindah dan isolasi geografis maka jarang berhubungan, sehingga di masa kini terdapat sekitar 28 dialek lokal

---

[7] Sebutan yang diberikan Perancis untuk Kaledonia Baru (Sumber: Collinsdictionary. 2017. Nouvelle Calédonie. Diakses dari https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nouvelle-caledonie. Pada 3 April 2020)

[8] Meter Di Bawah Permukaan Laut (Sumber: KBBI Daring. 2020. MDPL. Diakses dari : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mdpl. Pada 4 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

Melanesia di *Nouvelle Calédonie*. Setelah resmi menjadi Wilayah Seberang Lautan di tahun 1946, *Nouvelle Calédonie* mengalami konflik antara warga anti kemerdekaan Perancis (kaum anti-kemerdekaan) berhadapan dengan gerakan pro-kemerdekaan etnis pribumi Suku Kanak (Melanesia) dengan tokohnya Jean-Marie Tjibaou, yang berujung pada deklarasi pembentukan pemerintah etnis Suku Kanak di Provinsi Utara dari tahun 1967 hingga tahun 1985.

PBB kemudian memasukkan *Nouvelle Calédonie* sebagai teritorial bukan pemerintah (*Non-Self Governing Territories*[9]) di tahun 1986 yang perlu didekolonisasi sesuai Resolusi MU PBB 1514 (XV) 15 Desember 1960[10]. Resolusi tersebut menentukan pembentukan negara dengan tiga opsi: negara berdaulat (*sovereign state),* asosiasi bebas *(free association),* atau berintegrasi dengan negara berdaulat *(integration with an independent state)*. Sejak saat itu, Komite C-24 PBB[11] setiap tahunnya selalu membahas pandangan *administering power*[12](UN, 2006) Perancis maupun organisasi partai politik wakil Pro Kemerdekaan yaitu Front Pembebasan Nasional Suku Kanak dan Sosialis/ FLNKS dan perwakilan Pemerintah *New Caledonia* (dari kelompok anti kemerdekaan).

Sesuai dengan Resolusi MU PBB 1514 (XV), pembentukan *Matignon-Oudinot Accords* (1988) dapat dikatakan sebagai tahapan awal dalam membentuk

---

[9] Dalam Piagam PBB, *non-self governing territories* didefinisikan sebagai Wilayah "yang orang-orangnya belum mencapai tingkat penuh Pemerintah sendiri." (Sumber : United Nations. 2019. International Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories
25-31 May. Diakses dari: https://www.un.org/en/observances/non-self-governing-week. Pada 28 Mei 2020)

[10] Resolusi ini menegaskan bahwa untuk memastikan dekolonisasi, kepatuhan penuh dengan prinsip penentuan nasib sendiri diperlukan. (Sumber : United Nations. 2019. International Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories
25-31 May. Diakses dari: https://www.un.org/en/observances/non-self-governing-week. Pada 28 Mei 2020)

[11] Komite Khusus tentang Situasi Berkenaan dengan Implementasi Deklarasi Pemberian Kemandirian kepada Negara-negara dan Bangsa-Bangsa Kolonial, atau Komite Khusus Dekolonisasi (Sumber : CIA World Factbook. 2018. Introducing New Caledonia. Diakses dari : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_nc.html. Pada 6 April 2020)

[12] Merupakan kewajiban di bawah Piagam PBB untuk membawa orang-orang di Wilayah tertentu ke tingkat Pemerintahnya sendiri secara penuh, yang dapat dicapai melalui tiga langkah: asosiasi bebas, integrasi dengan Negara lain atau kemerdekaan (Sumber. United Nations. 2006. Role Of Administering Powers In Decolonization Process Discussed In Second Meeting Of Pacific Regional Seminar. Diakses dari : https://www.un.org/press/en/2006/gacol3149.doc.htm. Pada 4 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

tatanan sosial baru di Kaledonia Baru. Perjanjian tersebut sempat meredam konflik antara kaum pro-kemerdekaan Suku Kanak dan warga yang mendukung kelompok anti kemerdekaan, melalui pembangunan ekonomi, amnesti dan rekonsiliasi. Namun demikian ketidakpuasan terhadap implementasinya kemudian menuju pada kesepakatan baru yakni *Nouméa Accord* (1998), dimana perjanjian ini menjamin hak Pemerintah sendiri *(sui generis collectivity)* (tercantum dalam Pasal 77 Konstitusi Perancis), pembagian kedaulatan Pusat–Wilayah dan pembentukan lembaga Pemerintah, dan peralihan kekuasaan dalam waktu 20 tahun ke depan melalui referendum.

Kaledonia Baru memiliki beberapa partai politik yang secara nyata pada perjalanan politiknya saling bersaing untuk menentukan status negara di kemudian hari apakah tetap bertahan sebagai negara koloni Perancis atau memerdekakan diri. Hal ini juga berpengaruh terhadap perjalanan dan referendum yang dilaksanakan di tahun 2018. Berikut daftar partai politik di Kaledonia Baru (CIA World Factbook),

1. *Build Our Rainbow Nation,*
2. *Caledonia Together* atau *Ce* (Philippe Germain-Liberal Anti Kemerdekaan),
3. *Caledonian Union* atau Uc (Daniel Goa-Pro Kemerdekaan),
4. *Future Together (L'avenir Ensemble)* (Harold Martin),
5. *Suku Kanak Socialist Front For National Liberation* atau FLNKS (Aliansi termasuk: Palika, Uni, Uc, And Upm) (Victor Tutugoro-Pro Kemerdekaan),
6. *Labor Party (Parti Travailliste)* atau Pt (Louis Kotra Uregei-Sosialis Pro Kemerdekaan),
7. *National Union For Independence (Union Nationale Pour L'independance)* atau Uni,
8. *Party Of Suku Kanak Liberation (Parti De Liberation Suku Kanak)* atau Palika (Paul Neaoutyine- Sosialis Pro Kemerdekaan),
9. *Socialist Suku Kanak Liberation* atau Lks (Nidoish Naisseline- Sosialis Pro Kemerdekaan),

Digital Repository Universitas Jember

10. *The Republicans* (mantan partai The Rally atau Ump) (Interim Leader Thierry Santa),
11. *Union for Caledonia in France* (Partai Anti Kemerdekaan)

2.1 Demografi Imigran di Kaledonia Baru

Ketika Kaledonia Baru dianeksasi oleh Perancis pada tahun 1853, perkembangan koloni menjadi terikat dengan kolonialisme pemukim, eksploitasi mineral, peternakan, dan pembentukan koloni pemasyarakatan, semua mengharuskan pengambilalihan lahan-lahan besar dari tanah pemilik asli. Sepanjang sejarah Kaledonia Baru, tanah telah menjadi pusat konflik antara pemukim (imigran) dan penduduk asli Suku Kanak. Para imigran pertama tiba di Nouméa pada tahun 1855; mereka menempati area kecil di salah satu semenanjung yang mana tidak ada air dan tidak ada Suku Kanak. Menjelang pertengahan tahun berikutnya, beberapa pemukim, yang mencari tanah yang lebih baik, pergi ke luar semenanjung dan menghadapi perlawanan keras dari Suku Kanak di daerah itu (Saussol 1990: 38). Pembantaian beberapa pemukim menyebabkan serangkaian pembalasan yang ditujukan untuk memenangkan daerah itu, desa-desa dibakar, tanaman dihancurkan, dan tanah disita dan didistribusikan kembali kepada penjajah. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Perancis beralasan bahwa Suku Kanak mengalami periode pertanian yang panjang dan tidak efektif. Hal tersebut dianggap tidak memaksimalkan hasil pertanian dan perkebunan di tanah yang mereka miliki, karena hal ini dianggapb lebih menguntungkan dan produktif apabila dikelola oleh Pemerintah Perancis. Menteri Angkatan Laut dan Koloni Perancis menyatakan pandangan resmi Perancis dalam sepucuk surat kepada menteri luar negeri:

> "Penduduk yang beradab di suatu negara hanya memiliki hak dominasi yang terbatas, semacam hak pendudukan ... suatu peradaban yang beradab. kekuatan membangun koloni di negara semacam itu memperoleh kekuasaan yang menentukan atas tanah, atau, dengan kata lain, ia memperoleh hak untuk memadamkan gelar primitif "(Kircher 1986: 5).

Waktu berjalan, dan untuk memicu migrasi serta membiayai anggarannya, Pemerintah Perancis menjual tanah Suku Kanak dengan harga murah. Antara

Digital Repository Universitas Jember

tahun 1860 hingga tahun 1878 sejumlah hektar yang diserahkan kepada penjajah meningkat dari 1.000 menjadi 230.000 (Saussol 1985: 38). Namun, pendekatan dengan menjual tanah dengan cara sekaligus (membeli tanah dengan ukuran luas tertentu di daerah pedesaan dengan pemilik yang berbeda namun berada di satu wilayah pedesaan) ini tidak terlalu menguntungkan pemilik tanah kecil. Alih-alih, itu paling disukai oleh elit Perancis yang kaya di ibukota teritorial Nouméa, yang membeli tanah dan menjadi pemilik peternakan sapi. Sapi dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan, dan tidak ada pagar untuk mencegah 80.000 binatang buas berkeliaran ke tanah Suku Kanak dan menghancurkan tanaman kebun asli (Donna, 1991). Dari ketidakadilan ini muncul pemberontakan Suku Kanak pada tahun 1878.

Pada pergantian abad (abad ke 20), Kaledonia Baru adalah koloni imigran dengan jumlah imigran yang sangat sedikit. Pada saat yang sama, populasi Melanesia (sebagai salah satu kelompok imigran ke Kaledonia Baru) mengalami penurunan tajam. Populasi itu turun dari sekitar 60.000 pada kontak pertama menjadi 27.000 pada awal tahun 1900-an. Hal ini karena adanya epidemi, akibat dari pemberontakan, dan tingkat kelahiran yang rendah (Donna, 1991). Gubernur Kaledonia Baru saat itu, Feillet menggunakan angka yang menurun sebagai alasan untuk mengambil alih lebih banyak tanah dan mengurangi semua jatah lahan menjadi 3 hektar per penduduk, sehingga menyusutnya lahan yang dimiliki Suku Kanak dari 320.000 menjadi 120.000 hektar. Beberapa lahan hilang sama sekali, dan klan yang dipindahkan dikelompokkan bersama di daerah baru (Saussol 1985: 40).

Hal ini menjadi pengurangan yang paling sistematis dan radikal dari tanah yang dimiliki kaum Suku Kanak hingga saat ini. Benar-benar digantikan oleh sistem monopoli harga (atas hasil pertanian dan perkebunan) yang dibuat dan dipaksakan oleh Kolonial Perancis. Ruang geopolitik Suku Kanak tidak lagi memiliki kemiripan dengan tradisi masa lalu. Wilayah klan yang kohesif dan berdampingan secara kultural di masa lalu direduksi menjadi kumpulan komunitas terisolasi yang hancur. Pada tahun 1903, "*Cantonnement*" yaitu, praktik

Digital Repository Universitas Jember

membatasi Suku Kanak ke lahan atau ladangnya sendiri sebagai proses sistematis telah berhenti, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, seperti pembukaan tambang nikel baru, membuat lahan berkurang (Donna, 1991). Secara tidak resmi para kelompok imigran beserta ternak mereka terus merambah lahan Suku Kanak. Ketakutan terhadap tanah yang disita oleh Pemerintah masih ada sampai hari ini.

Setelah mencapai titik terendah sepanjang masa pada awal abad kedua puluh, populasi Suku Kanak mulai pulih dengan lambat. Tingkat kelahiran meningkat dan populasi Suku Kanak menjadi didominasi usia muda (seperti sekarang, dengan setengah dari populasi di bawah 20), kebalikan dari apa yang terjadi pada populasi kelompok Imigran. Pertumbuhan sektor komersial menyaksikan eksodus umum orang Eropa dari daerah pedesaan ke kota Nouméa dan menuanya populasi kelompok Imigran di sisi-sisi wilayah pedesaan. Imigrasi melambat, populasi Eropa 19.809 orang pada tahun 1911 turun menjadi 16.867orang pada tahun 1936 (Donna, 1991). Revitalisasi populasi Suku Kanak memunculkan kesadaran Pemerintah Perancis bahwa penduduk asli Kaledonia Baru tidak “menghilang". Kebijakan neokolonial mulai berbicara tentang "integrasi." Pada tahun 1930-an Pemerintah mulai mempromosikan partisipasi Melanesia dalam ekonomi pasar wilayah pertanian dan perkebunan di Kaledonia Baru, Suku Kanak didorong untuk menanam kopi, yang pada gilirannya memberi lebih banyak tekanan pada sumber daya yang ada karena perlunya adaptasi dan perawatan khusus agar kopi dapat tumbuh dengan baik disana.

Setelah Perang Dunia II, Pemerintah kolonial di Kaledonia Baru tumbuh lebih liberal. Kerja paksa berakhir dan Suku Kanak diberi suara. Reformasi ini mengubah struktur kekuasaan politik di wilayah tersebut, dan orang Suku Kanak tidak menunggu waktu lama untuk menggunakan pengaruh politik yang baru mereka temukan untuk merebut kembali tanah mereka. Tanah tanpa status pemilik pun pada tahun 1946 diperkirakan seluas 126.000 hektar segera tumbuh menjadi 162.000 hektar. Namun demikian ketidaksetaraan kolonial tetap ada, orang Suku Kanak masih dikecualikan dari ekonomi teritorial yang sedang berkembang, diturunkan ke posisi produksi petani kecil dan cadangan tenaga kerja murah.

Digital Repository Universitas Jember

Sejak awal, masuknya Suku Kanak ke arena politik dikaitkan dengan klaim tanah. Suku Kanak menuntut untuk memperluas tersedianya kembali lahan dan tanah mereka, yang didasarkan pada kebutuhan ruang nyata karena populasi mereka yang terus bertambah, dengan segera tuntutan tersebut menjadi cara untuk mengambil kembali tanah yang hilang selama *cantonnement*. Menurut Saussol (1985: 1619), itu adalah pembalasan atas sejarah dan ekspresi konkret dari kebangkitan Suku Kanak.

Pada tahun 1983, Pemerintah Partai Sosialis Perancis memperkenalkan undang-undang "perluasan otonomi" untuk wilayah yang ditempati suku Kanak dan mengusulkan periode transisi lima tahun dan referendum pada tahun 1989. *Front Indépendantiste* menolak proposal ini karena terlalu lambat; pada bulan Maret 1984, pada saat menjelang pemeriksaan undang-undang otonomi oleh Parlemen Perancis. Pemerintah Perancis datang ke wilayah itu untuk mempromosikan undang-undang yang kemudian hal itu diboikot oleh FI. Pada situasi lain, pasukan anti-kemerdekaan berdemonstrasi juga menentang pendudukan tanah Suku Kanak. RUU ini disahkan, dan polarisasi di Kaledonia Baru semakin meningkat (Fraser 1988: 17-18).

Suku Kanak sekarang memiliki kendali atas wilayah utara dan pulau yang didominasi pedesaan, di mana mereka mewakili mayoritas penduduk. Salah satu aspek yang paling menarik dari perjanjian tersebut adalah desentralisasi struktur birokrasi dan layanan pemerintah, upaya untuk lebih melayani daerah utara dan kepulauan yang lebih terpencil dan memberlakukan penghapusan bertahap lebih dari 4.000 pelayan publik Perancis metropolitan. Prioritas diberikan untuk pelatihan pegawai negeri Suku Kanak, petugas polisi, hakim, dokter, guru, perawat, dan sebagainya. Untuk menyeimbangkan kembali wilayah Suku Kanak dengan provinsi yang didominasi kulit putih, perkotaan, selatan, provinsi utara dan pulaumendapat manfaat dari 75 persen dari anggaran investasi publik wilayah itu. Proyek pengembangan dilakukan dan program pelatihan pemuda dilembagakan untuk memasukkan Suku Kanak muda ke dalam proyek pengembangan masyarakat. Pemerintah Perancis juga telah berjanji untuk

Digital Repository Universitas Jember

mempromosikan budaya Suku Kanak dan melestarikan warisan Suku Kanak di Kaledonia Baru. Perancis bertaruh dalam kurun waktu 10 tahun janji kepada Suku Kanak akan terlaksana, dengan terus membangun keterampilan, keahlian, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendekatkan mereka pada kemerdekaan.

Perkembangan Suku Kanak terus terhambat oleh kenyataan bahwa pada akhirnya berada di bawah Pemerintah kolonial yang mengendalikan dana pembangunan, suatu administrasi yang masih menganut gagasan evolusionisme paternalistik[13] (Donna W, 1991). Kebijakan pembangunan di Kaledonia Baru terus dilakukan di bawah paradigma yang mengasumsikan bahwa penduduk asli Suku Kanak harus beradaptasi dengan kondisi produksi dan reproduksi yang diberlakukan oleh kapitalisme. Agar pembangunan benar-benar berkelanjutan, kearifan dan pengetahuan asli perlu dimasukkan ke dalam skema pembangunan, yang digunakan untuk mengimplementasikan perubahan sosial-ekonomi di wilayah tersebut - tidak hanya di tingkat akar rumput tetapi juga di tingkat kebijakan nasional.

Selain itu, hegemoni budaya ini menyangkal legitimasi definisi kemajuan Suku Kanak. Proyek-proyek pembangunan seringkali tidak sesuai dengan konteks lokal. Jika segala bentuk pembangunan ingin berkelanjutan, ia harus memasukkan pengetahuan asli. Struktur tradisional ada di komunitas Suku Kanak yang dapat mempromosikan dialog yang menghubungkan keprihatinan Barat dan Suku Kanak. Blok yang paling signifikan untuk dialog adalah pendekatan top-down dan sikap infalibilitas dan superioritas budaya yang diasumsikan oleh banyak spesialis yang bekerja di Kaledonia Baru.

2.1.1 Populasi Imigran dan Pengaruhnya di Kaledonia Baru

Semenjak tahun 1800 hingga tahun 2000, kelompok imigran yang ada di Kaledonia Baru semakin kompleks, jumlahnya pun melebihi penduduk asli yakni

[13] Dapat disebut juga sebagai Evolusi Paternalisme, dipahami sebagai adopsi sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin dan dijalankan oleh “kalangan keluarga” pada sistem Pemerintah, dalam hal ini, yakni kalangan Kolonial Perancis. (Sumber : Fraser, H. 1988. New Caledonia: Anti-colonialism in a Pacific Territory. Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian National University)

Digital Repository Universitas Jember

Suku Kanak. Salah satu tujuan dari perjanjian yang telah dibuat oleh Kolonial Perancis ke Kaledonia Baru mengenai referendum dan hak-hak mereka, adalah untuk menunjukkan kepada Kaledonia Baru lainnya bahwa orang Suku Kanak dapat mengelola bisnis atau negara seperti yang lainnya. Jika aturan fundamental pembangunan ekonomi ditetapkan oleh Perancis melalui model-model Barat, maka betapapun baiknya niatnya, suku Kanak masih menghadapi risiko dislokasi pola hidup masyarakat lokal - tidak hanya produksi, perdagangan, dan konsumsi, tetapi pola otoritas tradisional, adat, dan budaya juga. Berikut gambar yang menjelaskan mengenai populasi imigran dan suku asli di Kaledonia Baru

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 2.1 Kaledonia Baru - Penduduk: Suku Kanak, Eropa dan lainnya 1887–2009[14]

Year	Kanaks number	%	Europeans number	%	Othersanumber	%	Total
1887	42,500	68.0	18,800	30	1200	2.0	62,500
1901	29,100	53.5	22,750	41.8	2,550	4.7	54,400
1911	28,800	56.9	17,300	34.2	4,500	8.9	50,600
1931	28,600	50.0	15,200	26.6	13,400	23.4	57,200
1946	31,000	49.4	18,100	28.9	13,600	17.0	62,700
1956	34,969	51.1	25,260	36.7	8,351	12.2	68,580
1969	46,200	46.0	41,268	41.0	13,111	13.0	100,579
1976	55,598	41.7	50,757	38.1	26,878	20.2	133,233
1983	61,870	42.6	50,757	37.1	29,524	20.3	142,151
1996	86,788	44.1	67,151	34.1	42,897	21.8	196,836
2004b	n/ab	n/ab	n/ab	n/ab	n/ab	n/ab	230,789b
[2009c	99,078c	40.3c	71,721c	29.2c	74,781c	30.5c]	245,580

Sumber : David Broustet, Pascal Rivoilan. 2009. Recensements de la population, Population Census, 2008 and 2009. Diakses dari Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie: https://www.insee.fr/fr/statistiques/1560282. Pada 7 Mei 2020

Tabel 2.1 menunjukkan rincian persentase populasi Suku Kanak dan Eropa dalam berbagai sensus sejak 1887. Tabel 2.1 juga termasuk angka yang dilaporkan oleh ISEE pada bulan April 2011 berdasarkan sensus tahun 2009, tetapi angka-angka ini termasuk kategori etnis ekstra dan tidak bisa membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya (lihat di bawah). Untuk tujuan analitik, Tabel 4.2 termasuk persentase-persentase masyarakat pada tahun 1996 dan angka-angka yang memenuhi syarat, tetapi tidak secara langsung sebanding, dilaporkan dari sensus tahun 2009 pada bulan April 2011.

[14] a. Lainnya: Termasuk warga Wallis dari Wallis dan Futuna, Tahiti, Indonesia, Vietnam, Ni-Vanuatu dan lainnya, kecuali untuk tahun 2009 (lihat catatan c) (Sumber : David Broustet, Pascal Rivoilan. 2009. Recensements de la population, Population Census, 2008 and 2009. Diakses dari Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie: https://www.insee.fr/fr/statistiques/1560282. Pada 7 Mei 2020)
b. Tidak ada kategori etnis dalam sensus 2004 dan dikenakan panggilan boikot oleh beberapa pihak. (Sumber : David Broustet, Pascal Rivoilan. 2009. Recensements de la population, Population Census, 2008 and 2009. Diakses dari Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie: https://www.insee.fr/fr/statistiques/1560282. Pada 7 Mei 2020)
c. 'Lainnya' pada tahun 2009 termasuk kategori baru 'métis' atau ras campuran, 'Caledonia', dan lebih banyak 'tidak dinyatakan' dan, karena alasan ini, angkanya tidak sebanding dengan tahun 1996 atau tahun-tahun sebelumnya, lihat Tabel 4.2 (Sumber : David Broustet, Pascal Rivoilan. 2009. Recensements de la population, Population Census, 2008 and 2009. Diakses dari Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie: https://www.insee.fr/fr/statistiques/1560282. Pada 7 Mei 2020)

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 2.2 Kaledonia Baru - Komposisi etnis dari populasi, 2009 dan 2014

Communauté d'appartenance	2009		2014	
	Effectif	%	Effectif	%
Européenne	71 721	29,2	73 199	27,1
Indonésienne	3 985	1,6	3 859	1,4
Kanak	99 078	40,3	104 958	39,1
Ni-Vanuatu	2 327	0,9	2 568	1,0
Tahitienne	4 985	2,0	5 608	2,1
Vietnamienne	2 357	1,0	2 506	0,9
Wallisienne et Futunienne	21 262	8,7	21 926	8,2
Autre : asiatique	1 857	0,8	1 177	0,4
Autre	2 566	1,0	3 428	1,3
Plusieurs communautés	20 398	8,3	23 007	8,6
"Calédonienne"	12 177	5,0	19 927	7,4
Non déclarée	2 867	1,2	6 604	2,5
Ensemble	**245 580**	**100,0**	**268 767**	**100,0**

Sumber : David Broustet, Pascal Rivoilan. 2009. Population des différentes communautés d'appartenance de Nouvelle-Calédonie en 2009 et 2014. Diakses dari Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie: https://www.insee.fr/fr/statistiques/1560282. Pada 7 Mei 2020

Sensus yang dilakukan tersebut mengukur distribusi penduduk menurut komunitas tempat mereka berada (Tabel 2.2). Pada 2014, 105.000 orang, atau 39% dari total populasi, mengatakan bahwa mereka adalah anggota komunitas Kanak. Eropa mewakili 73.200 penduduk, atau 27% dari deklarasi. Berikutnya adalah Wallisian dan Futunian dengan 22.000 orang (8%). Komunitas lainnya

Digital Repository Universitas Jember

(Tahiti, Indonesia, Ni-Vanuatu, Vietnam dan populasi Asia lainnya) mewakili total kurang dari 6% populasi (Tabel 2.2). Hampir satu dari sepuluh penduduk mengatakan bahwa mereka adalah Métis atau berasal dari beberapa komunitas. Di antara mereka, hampir 20.000 (7% dari total populasi) menyatakan sebagai bagian dari komunitas “Caledonian”, 3.400 orang menyatakan komunitas selain yang diusulkan (1%), dan akhirnya 6.600 orang tidak menjawab pertanyaan ini (2%).

Untuk Kepulauan Loyalitas, hampir semua (94%) penduduknya adalah komunitas Kanak. Orang Eropa, komunitas terbesar kedua di provinsi ini, hanya mewakili 2% dari total populasi. Di Provinsi Utara, komunitas Kanak mencakup 70% populasi, 12% orang Eropa dan 6% penduduk menyatakan bahwa mereka tergabung dalam beberapa komunitas. Namun, ada perbedaan besar antara kedua lereng tersebut: di kotamadya pantai timur, suku Kanak mewakili 86% populasi dibandingkan 53% di pantai barat. Di provinsi selatan, orang Eropa adalah yang paling banyak (33%), diikuti oleh Kanak (26%) dan Wallisians dan Futunians (11%). Ini juga merupakan provinsi di mana keanekaragaman komunitas adalah yang paling penting, terutama di Greater Noumea, yang memiliki dua pertiga dari total populasi Caledonian, tetapi di mana 84% komunitas selain Kanak berada.

Selama lima tahun terakhir, distribusi penduduk menurut komunitas tidak banyak berubah. Komunitas Tahiti khususnya, yang mewakili 2% dari populasi, mempertahankan dirinya sendiri karena pergerakan migrasi dari Polinesia Prancis. Pangsa komunitas Kanak, Eropa dan Wallisian-Futunian sedikit menurun (masing-masing - 1, - 2 dan - 0,5 poin). Di sisi lain, ada lebih banyak orang yang tidak menjawab pertanyaan atau mengatakan bahwa mereka termasuk dalam komunitas "Caledonian" dibandingkan tahun 2009 (masing-masing +1 dan + 2,5 poin).

Mengingat rumusan ulang pertanyaan tersebut pada tahun 2009 (seperti pada pembahasan di Tabel 2.1 sebelumnya), perbandingan dengan sensus sebelumnya hanya mungkin dilakukan setelah pengelompokan komunitas tertentu. Jadi, pada tahun 2014, suku Kanak dan Kanak campuran membentuk 43%

Digital Repository Universitas Jember

populasi, suatu proporsi yang telah stabil selama dua puluh lima tahun (45% pada tahun 1989). Orang Eropa dan campuran Eropa mewakili 31% dari populasi (34% pada tahun 1989) dan Wallisia dan Futunians dan Wallisians dan Futunians campuran 10%, dibandingkan dengan 9% pada tahun 1989.

2.1.2 Pengaruh Kelompok, Etnis dan Wilayah atas Hasil Referedum

Pada tanggal 4 November 2018, dilakukan proses pengambilan suara pada referendum, isi pertanyaan untuk referendum adalah *"Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante?* "Apakah Anda ingin Kaledonia Baru mencapai kedaulatan penuh dan menjadi mandiri?" (VOA, 2018).

Gambar 2.1 Kertas Pemilihan untuk Referendum

(Sumber : VOA. 2018. *In New Caledonia Independence Vote Turnout High, Results Trickle in*. Diakses dari :https://www.voanews.com/east-asia-pacific/new-caledonia-independence-vote-turnout-high-results-trickle. Pada 30 Mei 2020)

Para pemilih diberikan kertas suara bertanda (Gambar 2.1) *OUI* (ya) dan *NON* (tidak) dan diinstruksikan untuk menunjukkan pilihan mereka dengan menempatkan salah satu dari dua di dalam amplop dan menyimpannya di kotak suara. Hasil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Perancis menunjukkan bahwa 56,4% suara memberikan dukungan untuk mempertahankan status wilayah saat ini terhadap 43,6% untuk kemerdekaan, margin kemenangan yang lebih ketat daripada perkiraan polling. Pemungutan suara menghasilkan penolakan

Digital Repository Universitas Jember

kemerdekaan sebesar 56, 67% dari suara yang diberikan, dengan tingkat partisipasi sebesar 81,01% dari mereka yang terdaftar dalam daftar referendum. Hasil ini, meskipun tidak konsisten dengan jajak pendapat, namun sesuai dengan tren pemilihan yang diamati sehubungan dengan hasil pemilihan umum daerah sebelumnya. Memang, sementara jajak pendapat memperkirakan kemenangan luar biasa dari 'Tidak' di sekitar 70%, 'hanya' 56,67% suara yang mendukung Kaledonia Baru Perancis (David C, 2019).

Enam jajak pendapat dilakukan oleh berbagai lembaga di Kaledonia Baru antara bulan April 2017 dan bulan September 2018 tentang niat memilih selama referendum pada tanggal 4 November 2018, memberikan skor 'Tidak' mulai dari 54% (pada bulan April 2017) hingga 75% (pada bulan Agustus 2018) . Tiga jajak pendapat terakhir, dilakukan pada bulan Agustus dan bulan September 2018, memperkirakan penguatan 'Tidak' menjelang referendum, penolakan kemerdekaan antara 64 dan 75% dari niat memilih.

Pada konteks ini, kemenangan besar kelompok anti kemerdekaan tampak bagi banyak pejabat terpilih tertentu. Putusan ‘70 per 30 'dinyatakan sebagai hasil yang dicapai, beberapa bahkan mempertimbangkan bahwa hasil yang buruk dari' Ya 'hanya dapat menyebabkan perwakilan pro-kemerdekaan untuk menyerahkan dua referendum berikut yang disediakan oleh Perjanjian Nouméa. Sedangkan di belakang layar, eksekutif Negara Perancis sudah khawatir tentang reaksi sebagian penduduk terhadap skor yang bisa dianggap memalukan (karena marginnya sangat tipis atau sedikit) dan dengan demikian dapat menimbulkan pertanyaan serius tentang pemilih yang tidak loyal, yang menghasilkan risiko tinggi kekacauan publik.

Tingkat partisipasi yang sangat tinggi dari 81,01% disambut oleh semua pengamat. Kontes pemilihan yang lebih umum di Kaledonia Baru tidak menghasilkan partisipasi pemilih yang kuat; tetapi pertaruhan konsultasi 4 November 2018 menyebabkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari biasanya. Bagaimanapun, tingkat partisipasi ini tidak luar biasa dalam hal referendum

Digital Repository Universitas Jember

penentuan nasib sendiri. Sebagai contoh, negara Quebec, misalnya, 93,52% pemilih mengambil bagian dalam referendum pertama tentang kemerdekaan provinsi Kanada pada tahun 1995 (Election Québec, 2019). Skotlandia, 84,59% pemilih yang memenuhi syarat pergi untuk memilih konsultasi tentang kemerdekaan negara pada tahun 2014 (McInnes, 2015). Pasifik, hampir 95% populasi dewasa Tokelau memilih dalam referendum penentuan nasib sendiri 2006 dan 87% pada 2007 (Hooper, 2008).

Partisipasi di luar perhitungan tersebut, terdapat keseimbangan kekuasaan yang dicatat oleh referendum sebesar 56,67% terhadap 43,33% secara akurat mencerminkan distribusi suara dalam pemilihan provinsi pada tahun 2014, yang tampaknya merupakan satu-satunya suara yang dapat dijadikan patokan. Memang, dan secara sangat skematis, orang-orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Khusus untuk Pemilihan Provinsi (LESP) adalah mereka yang telah tinggal di Kaledonia Baru sejak paling lambat pada akhir tahun 1998. Seperti halnya secara umum, para pemilih yang terdaftar dalam daftar referendum (LESC) adalah orang yang bertempat tinggal di Kaledonia Baru, pelaksanaan untuk pendaftaran ini dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 1994.

Distorsi antara kedua daftar itu terutama menyangkut orang-orang yang menetap di Kaledonia Baru antara tahun 1995 dan tahun 1998 yang terdaftar di LESP[15] tetapi tidak di LESC. Seperti yang dapat kita lihat, konvergensi antara dua daftar pemilihan memiliki perbandingan relatif, menghasilkan temuan kesenjangan kecil antara hasil referendum dan pemilu provinsi tahun 2014 dan tahun 2019: di sini, 58,5%, kemudian 57,6% dari suara diberikan mendukung daftar milik gerakan kelompok anti kemerdekaan; terhadap 41,5%, kemudian 42,4%, untuk daftar independen, yang dapat dikatakanm, sebenarnya malah terjadi kenaikan untuk pendukung pro kemerdekaan dan sebaliknya (David, 2019), sehingga, berikutdi jelaskan mengenai hasil referendum tiap Provinsi:

[15] Daftar Pemilihan Khusus untuk Pemilihan Provinsi. (Sumber : Election NC. 2018. La liste électorale spéciale consultation. Diakses dari : https://www.elections-nc.fr/les-listes-electorales/les-3-listes-electorales/la-lesc. Pada 7 Juni 2019)

Digital Repository Universitas Jember

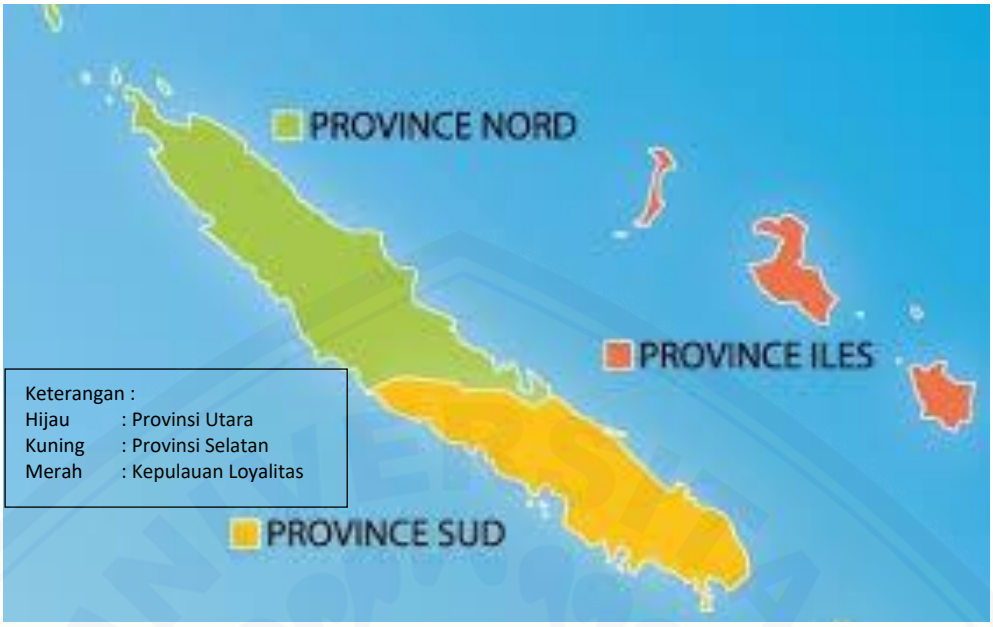

Gambar 2.2 Pembagian Provinsi di Kaledonia Baru

Sumber: David C. 2019. *The road to sovereignty for New Caledonia ? Analysis of the November 2018 con- sultation on self-determination*. Small States and Territories Journal, University of Malta. Hal.5

1. Provinsi Selatan, sekitar tiga perempat pemilih memberikan suara 'Tidak' dalam referendum. Sejak tahun 1999, proporsi pemungutan suara kelompok anti kemerdekaan telah berfluktuasi antara 78% pada tahun 1999, 80% pada tahun 2004, 85% pada tahun 2009, 82% pada tahun 2014 dan 80,5% pada tahun 2019. Mengingat bahwa para pemilih berbeda, skor tinggi dari 'Ya' di provinsi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa jumlah pemilih kelompok anti kemerdekaan meningkat sebesar 18% dibandingkan dengan pemilihan provinsi tahun 2014; sementara jumlah pemilih separatis meningkat 49% dibandingkan periode yang sama untuk referendum. Peningkatan dalam pemungutan suara pemisahan diri ini terutama terlihat di lingkungan yang kekurangan, yang sebagian merupakan efek dari pendaftaran otomatis orang-orang berstatus sipil adat, yaitu masyarakat adat. Namun demikian, hal ini juga menegaskan tren yang diamati dalam pemilihan provinsi tahun 2014 dan tahun 2019.
2. Sebaliknya, di Provinsi Utara, sekitar tiga perempat pemilih memilih 'Ya' untuk pemisahan diri. Ini merupakan kemunduran bagi separatis karena proporsi suara pro-kemerdekaan dalam pemilihan provinsi adalah 68%

Digital Repository Universitas Jember

pada tahun 1999, kemudian 70% pada tahun 2004, 67% pada tahun 2009 tetapi 80% pada tahun 2014 dan tahun 2019. Masih mengingat perbedaan antara pemilih, suara kelompok anti kemerdekaan adalah 42% lebih tinggi; sementara suara separatis hanya 30% lebih tinggi, jika dibandingkan dengan hasil pemilihan provinsi tahun 2014. Distribusi suara tetap, dalam hal apapun, dalam norma untuk Provinsi Utara.

3. Akhirnya, di provinsi Kepulauan Loyalitas, 82% suara diberikan untuk kemerdekaan. Sekali lagi, ini sesuai dengan penurunan dari pemilihan provinsi 2014 untuk separatis karena mereka memperoleh 93% suara (90,6% pada 2019). Hampir 95% penduduknya adalah Suku Kanak. Akibatnya, peningkatan substansial suara kelompok anti kemerdekaan dijelaskan oleh lanskap politik saat ini di provinsi Kepulauan Loyalitas, dengan tidak adanya pembaruan kelas politik kelompok anti kemerdekaan di pulau-pulau. Namun demikian, distribusi suara tampaknya mencerminkan keseimbangan politik kekuasaan yang diamati pada tahun 1999 (23%) dan 2004 (20%) ketika kubu kelompok anti kemerdekaan lebih terstruktur dan lebih terorganisir di provinsi ini.

Antara beberapa pelajaran yang dapat diambil dari analisis suara yang lebih disempurnakan, cukup luar biasa untuk dicatat bahwa hasil di TPS luar lokasi sangat mirip dengan tren yang diamati di kota yang bersangkutan. Stasiun-stasiun ini didirikan untuk orang-orang yang berasal dari pulau yang berbeda (Belep, Lifou, Maré, Ouvéa dan Isle of Pines) tetapi tinggal di Nouméa untuk memilih di ibukota, meskipun tetap terdaftar di pulau asli mereka. Sedangkan di Belep, suara yang mendukung kemerdekaan adalah 94,45%, TPS Noumea untuk Belep 93,97% dari ‘Ya’. Untuk Lifou, ada 79,92% suara 'Ya' di tempat dan 80,75% dan 79,76% masing-masing di dua stasiun yang dipindahkan. Untuk Maré, 84,58% suara 'Ya' di tempat dan 84,2% suara separatis di stasiun yang dipindahkan. Hal yang sama di Ouvéa (84,08% 'Ya' di tempat dan 84,18% di kantor di luar lokasi) dan Isle of Pines (70,31% di tempat dan 67,32% di kantor di luar lokasi) (David, 2019).

Digital Repository Universitas Jember

Koherensi suara semacam itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan berulang tentang pengaruh potensial dari eksodus pedesaan dan transisi ke kehidupan kota yang lebih Barat, pada suara populasi Suku Kanak (Pantz & Robertson, 2018). Pengaruh kecil terlihat jelas. Namun demikian, masih sulit untuk menentukan apakah motivasi dari pemungutan suara ini di stasiun yang dipindahkan menanggapi pemungutan suara identitas atau lebih tepatnya keinginan untuk mengubah model, dalam menghadapi masyarakat yang terlalu tidak setara.

Dalam kasus apa pun dan tanpa posisi ideologis apa pun, hasil ini dapat dilihat secara positif oleh pengamat yang tidak memihak. Skor itu cukup ketat untuk tidak dipertanyakan dan tidak menyebabkan gangguan publik yang signifikan. Ini juga merupakan hasil yang baik karena semuanya tetap dalam arti bahwa penyimpanan suara yang dapat dimobilisasi di kedua sisi dapat memberikan harapan kepada semua orang bahwa kemenangan ada di ujung jalan.

2.1.3 Politik Kelompok Imigran di Kaledonia Baru

Kaledonia Baru adalah masyarakat yang terpecah, konsekuensi utamanya adalah kerangka kerja politik spesifik yang mengarah pada organisasi kelembagaan unik yang dirancang oleh Kesepakatan Nouméa. Sebagai koloni pemukim, populasi Kaledonia Baru dibagi menjadi beberapa komunitas, dua yang utama adalah penduduk asli (Suku Kanak Melanesia) dan populasi asal Eropa. Menurut sensus tahun 2014, 39,1% penduduk Kaledonia Baru menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari komunitas Suku Kanak (104.958 orang). Komunitas kedua yang paling terwakili adalah Eropa: 27,1% dari sensus-deklarasi mandiri (73.199 orang), diikuti oleh Wallis dan Futunian (berasal dari wilayah Perancis Pasifik lainnya): 8,2% (21.926 orang). Secara keseluruhan, komunitas lain yang diidentifikasi mewakili 7,1% dari total populasi: Polinesia Perancis (2,1%), Indonesia (1,4%), Ni-Vanuatu (1%), Vietnam (0,9%), orang lain dari Asia (0,4%) dan sisanya (1,3%). Selain itu, 8,6% dari populasi menyatakan dirinya milik beberapa komunitas atau ras campuran. 7,4% menyatakan mereka milik

Digital Repository Universitas Jember

'komunitas Caledonian', menolak untuk memilih di antara komunitas yang diusulkan. Berikut dijelaskan dalam Gambar 2.3:

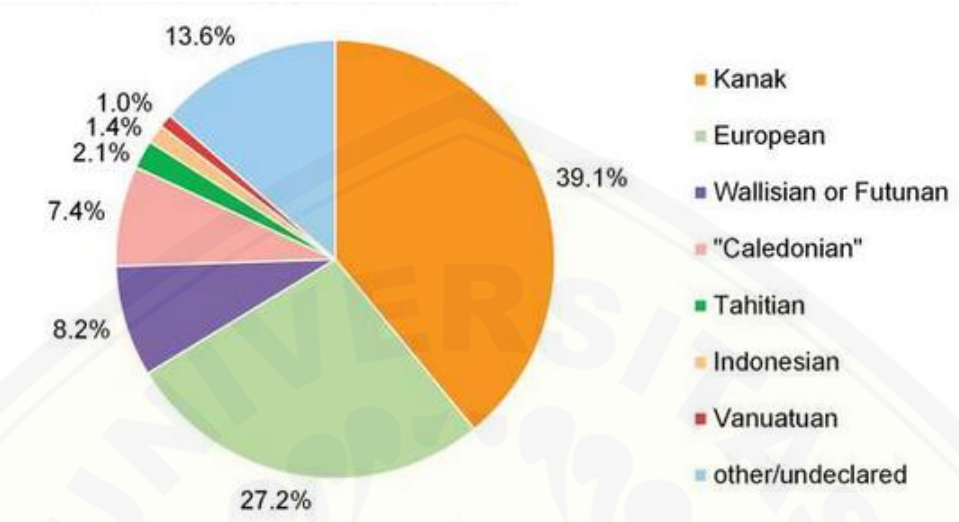

Gambar 2.3 Komposisi Etnis di Kaledonia Baru

(Sumber : Foster, S,. Shineberg, D. L. 2019. New Caledonia. Diakses dari Encyclopædia Britannica : https://www.britannica.com/place/New-Caledonia-French-unique-collectivity-Pacific-Ocean. Pada 10 Mei 2020)

Perpecahan antara komunitas yang berbeda diperkuat oleh distribusi geografis populasi, yang nampak sangat jelas ditentukan sesuai dengan latar belakang etnis. Provinsi Kepulauan Loyality, penduduk Suku Kanak mewakili 94% dari populasi. Pada Provinsi Utara, 70,5% dari populasi adalah milik masyarakat Suku Kanak; 12% untuk komunitas Eropa; 6,5% menyatakan mereka milik beberapa komunitas; dan 11% milik komunitas lain (terutama orang Asia dan Polinesia). Provinsi Selatan adalah provinsi terpadat dengan 199.983 penduduk dan lokasi Noumea, ibukota, dan pinggiran kota. Noumea, merupakan tempat komunitas Eropa adalah yang terbesar (33%), diikuti oleh komunitas Suku Kanak (26,1%), Wallisian dan Futunian (10,7%), mereka yang menyatakan bahwa mereka milik dua atau lebih komunitas (9,7%) dan mereka yang termasuk dalam komunitas Suku Kanak. komunitas lain (sekitar 20%). Perhatikan bahwa lebih dari 90% dari semua komunitas Non-Suku Kanak di Kaledonia Baru tinggal di Provinsi Selatan; tetapi hanya sekitar 50% orang Suku Kanak yang melakukannya.

Digital Repository Universitas Jember

Seperti yang sering terjadi dalam masyarakat majemuk, dipahami sebagai masyarakat yang terbagi dalam kelompok dan komunitas linguistik, etnis, agama, atau ras yang berbeda, kerangka kerja politik di Kaledonia Baru dirancang sesuai dengan karakteristik etnokultural populasi. Memang, dalam masyarakat yang terpecah, pernyataan ini berlaku untuk Kaledonia Baru karena pembagian masyarakat jelas tercermin dalam kerangka politik. Selain itu, pembagian masyarakat Kaledonia Baru diperkuat oleh masalah emansipasi, karena fragmentasi etnis berhubungan erat dengan klaim politik untuk kedaulatan. Konsekuensinya, partai politik diorganisasikan berdasarkan fragmen politik dan etnis ini. Memang, sebagian besar penduduk Suku Kanak mendukung kemerdekaan sedangkan mayoritas masyarakat lainnya bersimpati pada Kaledonia Baru yang tersisa sebagai wilayah Perancis.

Yurisdiksi provinsi mencakup pembangunan ekonomi, pertanian, pendidikan dasar, budaya, pemuda, olahraga dan rekreasi, beberapa aspek kesehatan dan pekerjaan sosial, dan perlindungan lingkungan. Konsep provinsialisasi adalah kunci dalam desain kelembagaan *Matignon Accords* pada tahun 1988 dan Perjanjian Nouméa pada tahun 1998 yaitu mereka merepresentasikan yang lebih adil dari populasi dan distribusi kekuasaan yang lebih adil antara separatis dan kelompok anti kemerdekaan sehubungan dengan distribusi relatif mereka atas bagian wilayah yang berbeda.

Selain itu, otonomi budaya hadir dengan status pribadi adat, yang membuat orang Suku Kanak untuk diperintah oleh adat di bidang hukum sipil. Tanah adat, dan identitas Suku Kanak secara umum, adalah wilayah di mana otonomi non-teritorial berlaku. Ada perangkat tambahan untuk mencapai pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang terpecah seperti bikameralisme (bahwa komunitas Suku Kanak memiliki utusan yang mengatur soal politik dan utusan untuk urusan umum) yang sebagian ada di Kaledonia Baru mengenai masalah-masalah seperti identitas Suku Kanak, adat dan penguasaan lahan adat, penunjukan lembaga adat dan pluralisme hukum tentang masalah sipil dan penguasaan lahan. Rekayasa kelembagaan dan hukum saat ini adalah hasil dari

Digital Repository Universitas Jember

negosiasi dan konflik selama beberapa dekade. Namun demikian, para pemimpin separatismenganggap ini sebagai langkah belaka dalam proses yang berkelanjutan: perjuangan untuk kemerdekaan adalah pekerjaan yang sedang berjalan.

2.2 Hubungan Bilateral Perancis dan Kaledonia Baru

Kaledonia Baru, telah menjadi koloni Perancis sejak 1853 bersama dengan Polinesia Perancis, bagian strategis dari kerajaan Pasifik Selatan Perancis. Sejak tahun 1970-an penduduk asli yakni Suku Kanak yang berpopulasi sekitar 42 persen dari populasi, telah terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan dari Pemerintah Perancis. Pada tahun 1980-an pertarungan ini menjadi perjuangan bersenjata, sehingga membawa korban ke komunitas Suku Kanak, militer Perancis, dan pemukim kulit putih. Dalam upaya untuk menghindari perang saudara, Perdana Menteri Perancis, Michel Rocard, menyatukan anggota FLNKS dan RPCR (Rally for Caledonia in the Republic) demi memutuskan masa depan Kaledonia Baru melalui sebuah negoisasi untuk menentukan keputusan. Negosiasi ini dikenal sebagai *"Matignon Accords*," yang kemudian dikenakan pada wilayah tersebut oleh Perancis.

2.2.1 Perjanjian Matignon

Kesepakatan itu (*Matignon*) menandai 10 tahun "masa damai" di mana Pemerintah Perancis berusaha untuk memperbaiki ketidaksetaraan sosial ekonomi di wilayah Kaledonia Baru, terutama melalui program pengembangan dan pelatihan di masyarakat Suku Kanak. Pada tahun 1998, pada akhir periode 10 tahun ini, orang-orang Kaledonia Baru diminta untuk memilih antara merdeka atau tetap bertahan sebagai negara koloni Perancis. FLNKS, yang mewakili sekitar 80 persen penduduk asli, diakui sebagai perwakilan sah orang Suku Kanak; hal ini tercantum undang-undang sebelumnya (sebelum Matignon ditetapkan) yakni Undang-Undang Pons[16]. Poin tersebut adalah poin penting,

[16] Undang-undang ini mengatur atas pembagian wilayah di Kaledonia Baru menjadi 3 Wilayah, yakni Kepulauan Loyality, Provinsi Utara dan Provinsi Selatan (Sumber : United Nations. 2006. Role Of Administering Powers In Decolonization Process Discussed In Second Meeting Of Pacific

Digital Repository Universitas Jember

karena itu merupakan hasil dari Undang-Undang Pons, dengan rekolonisasi sistematis atas tanah Suku Kanak oleh non-Suku Kanak, yang pada proses penetapannya memicu paling banyak protes antara Suku Kanak dan Non Kanak. Selain itu, hal tersebut disebabkan telah melalui proses kemenangan penting bagi front kemerdekaan yakni pembebasan semua tahanan politik Suku Kanak, yaitu orang Suku Kanak yang ditahan di penjara Perancis karena kejahatan yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan.

Wilayah di Kaledonia Baru dibagi menjadi tiga wilayah utara, selatan dan pulau-pulau. Suku Kanak menduduki wilayah utara dan kepulauan yang didominasi pedesaan, di mana mereka terdiri dari mayoritas populasi. Proyek-proyek pembangunan dilembagakan dan struktur birokrasi serta layanan pemerintahan didesentralisasi agar dapat melayani wilayah utara dan kepulauan yang lebih terpencil dengan lebih baik. Untuk menyeimbangkan kembali wilayah Suku Kanak dengan provinsi yang didominasi oleh kulit putih, di perkotaan, Provinsi Selatan, wilayah lain yakni Provinsi Utara dan Kepulauan Loyalitas mendapat manfaat dari 75 persen dari anggaran investasi publik wilayah itu. Prioritas diberikan untuk melatih pegawai negeri Suku Kanak, petugas polisi, hakim, dokter, guru, perawat dan sebagainya. Selain itu, program pelatihan pemuda memasukkan Suku Kanak muda ke dalam proyek pengembangan masyarakat (Australian National University, 2017)

2.2.2 Perekonomian

Suku Kanak di Kaledonia Baru menghasilkan pertanian berupa ubi dan taro untuk konsumsi lokal. Pada beberapa cadangan, produksi dalam negeri ini dilengkapi dengan produksi kopi untuk konsumsi lokal dan ekspor. Hal ini didefinisikan oleh Kohler (dalam Donna W, 1989: 12) sebagai "ekonomi kolonial" yang bertumpu pada tiga pilar: peternakan, pertambangan dan ekspor-impor. Peternakan bukan lagi kegiatan penting di Kaledonia Baru; hanya menghasilkan 2 persen dari produk domestik bruto. Namun, sektor peternakan memainkan peran ideologis yang penting di Kaledonia Baru karena membenarkan pendudukan

---

Regional Seminar. Diakses dari : https://www.un.org/press/en/2006/gacol3149.doc.htm. Pada 4 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

Eropa atas tanah luas yang diklaim oleh Suku Kanak. Tanah Kaledonia Baru adalah sumber nikel yang kaya: mereka mengandung 20 persen cadangan nikel dunia, dan bijih nikel mewakili 80 persen ekspor wilayah tersebut. Industri nikel adalah salah satu perusahaan terbesar di Kaledonia Baru, mempekerjakan sekitar 3.000 pekerja terampil dan semi-terampil. Perusahaan nikel terbesar Kaledonia Baru (*le Société le Nickel),* dimiliki oleh Pemerintah Perancis. Meskipun industri nikel di Kaledonia Baru mengalami resesi pada pertengahan tahun 1970-an dengan jatuhnya harga nikel dunia, bukti menunjukkan bahwa kenaikan harga nikel saat ini membawa ledakan baru dalam produksi nikel (Donna W, 1991).

Perdagangan ekspor-impor sepenuhnya dikendalikan oleh beberapa keluarga Eropa. Konsumen utama barang-barang ini, yang diimpor terutama dari Perancis, adalah 10.500 pegawai negeri Perancis yang ditempatkan di Kaledonia Baru, yang terdiri dari 30 persen dari penerima upah di wilayah itu. Penting untuk dicatat bahwa, secara ekonomi Kaledonia Baru terikat ke Perancis dan melalui Perancis ke Pasar Bersama Eropa. Ada sedikit atau tidak ada upaya untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam ekonomi wilayah Pasifik Selatan. Keterasingan regional ini diperkuat oleh hambatan bahasa, yang membuat orang-orang Kaledonia Baru dan khususnya orang Suku Kanak dalam menjalin hubungan dengan tetangga mereka yang dapat berbicara bahasa Inggirs.

Pada pembahasan kedaerahan, pemeriksaan divisi regional yang diusulkan oleh *Matignon Accords* menunjukkan bahwa Provinsi Selatan, yang terdiri dari 90 persen populasi Eropa dan imigran, mendapat hak istimewa yang berkelanjutan. Secara politik ini berarti bahwa pihak konservatif anti-kemerdekaan mendominasi Kongres Teritorial yaitu Provinsi Selatan memiliki 32 kursi, sebagai lawan dari 22 kursi untuk Provinsi Utara dan Kepulauan. Berdasarkan Kesepakatan Matignon, Provinsi Selatan juga memastikan adanya dominasi ekonomi. Bagian selatan berisi industri yang paling penting di wilayah ini, *Société le Nickel,* yang mengelola peleburan nikel dan memiliki beberapa tambang nikel penting di selatan. Satu-satunya sumber listrik Kaledonia Baru, bendungan hidroelektrik di Yaté, juga di selatan. Semua impor dan ekspor melewati pelabuhan selatan Nouméa, ibukota wilayah itu, atau melalui bandara internasional terdekat.

Digital Repository Universitas Jember

Provinsi selatan juga berisi bagian penting dari dataran subur barat dan Pulau Pines, yang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Provinsi Selatan mengandung dua pertiga dari angkatan kerja, sebagian besar personel manajemen dan hampir semua pusat kota di wilayah itu.

Undang-undang Pons melembagakan program "nominasi" di daerah pedesaan, di mana pasukan militer ditempatkan di pemukiman suku Kanak. Kehadiran militer yang kuat ini (12.000 personel militer dan polisi untuk populasi Suku Kanak yang berjumlah 66.000) telah menjadi sumber ketegangan yang konstan di wilayah tersebut (Donna W, 1989). Pada musim panas tahun 1988, ketika pasukan militer menyerbu markas FLNKS untuk menyelamatkan sandera Perancis, pertumpahan darah ini mengejutkan komunitas Suku Kanak. Orang Suku Kanak ingin mengakhiri kekerasan yang terjadi. Para pemimpin FLNKS moderat percaya bahwa perjanjian Matignon membuat provinsi Suku Kanak bisa berkembang dan makmur, membuat orang Suku Kanak untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi lebih mandiri di Provinsi Selatan dan pada akhirnya menjalankan negara Pasifik Selatan yang independen.

Menurut Pemerintah Perancis, Provinsi Utara dan Kepulauan menerima dukungan finansial yang besar, yang menstimulasi ekonomi regional dan menjadikan provinsi memulai proyek pembangunan mereka sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Meskipun sejumlah proyek kecil (koperasi rumah, kebun) telah dimulai, beberapa pakar mengklaim bahwa inisiatif ini tidak cukup untuk menyeimbangkan kembali ekonomi wilayah dalam waktu 10 tahun. Kesenjangan sosial-ekonomi dan keberlanjutan struktur kolonial dimana para kolonial sebagai kapitalis yang mendapatkan keuntungan besar dari hasil tanah sehingga Suku Kanak adalah pihak yang dirugikan.

Tidak dapat dihindari, sebagian besar dari investasi dalam sektor pertanian dan perkebunan menemukan jalannya ke daerah selatan. Bisnis utama konstruksi dan komersial telah terpusat, dengan demikian memperkuat potensi pembangunan Provinsi Selatan. Selama keuangan negara mendukung ekonomi ekspor-impor di selatan, ekonomi Suku Kanak tidak dapat berkembang secara mandiri; itu tetap

Digital Repository Universitas Jember

menjadi sistem bawahan ekonomi kolonial. Provinsi Utara dan Kepulauan Loyality dibentuk sebagai bagian “wilayah pinggiran” dari Provinsi Selatan yang merupakan pusat pemerintah Kaledonia Baru, terutama dengan sumber bahan bakunya dan cadangan tenaga kerjanya yang murah.

2.2.3 Mempertahankan Status Quo

Pemerintah Perancis menolak untuk menarik struktur kolonial Kaledonia Baru. Telah disebutkan bahwa masalah wilayah itu berasal dari kurangnya komunikasi, dari ketidakmampuan komunitas etnis di wilayah itu untuk hidup berdampingan secara damai. Pemerintah Perancis melihat konflik saat ini sebagai akibat dari kesalahpahaman timbal balik, masalah sosial di mana Pemerintah Perancis memainkan peran ombudsman[17], merangsang dialog dan pemahaman, rekonsiliasi dan persaudaraan. Presiden Mitterand percaya bahwa untuk mengintegrasikan Suku Kanak ke dalam masyarakat Kaledonia Baru melalui "lebih banyak persamaan, rasa keadilan dan rasa hormat untuk setiap individu dan budayanya." Kehadiran Perancis menghilangkan diskriminasi dan membangun kolonialisme yang adil, yang bertentangan dengan kolonialisme yang tidak adil di masa lalu.

Dalam menetapkan dirinya sebagai ombudsman "tidak memihak", negara Perancis menyangkal karakter kolonial intrinsik dari hubungannya dengan Kaledonia Baru. Kesepakatan Matignon mewakili reformasi kolonial, bukan dekolonisasi. Pemerintah Perancis berusaha menyenangkan orang Suku Kanak tanpa membuat orang Eropa tidak senang dengan cara mereka memberi modal kepada Suku Kanak tanpa membongkar basis kekuatan orang Eropa. Pada akhirnya, bantuan keuangan yang dipompa ke pengembangan Provinsi Utara dan Kepulauan hanya berfungsi untuk memperkuat dominasi wilayah selatan dan Eropa.

Kesepakatan Mantignon memperkuat kontrol Perancis atas Kaledonia Baru. Masa damai 10 tahun berarti 10 tahun kehadiran Perancis yang dijamin.

[17] Istilah ini untuk menjelaskan pegawai pemerintah (seperti di Swedia dan Selandia Baru) yang ditunjuk untuk menangani pengaduan orang yang mendapat perlakuan tidak adil atau sewenang-wenang dalam pelayanan masyarakat (Sumber : KBBI Daring. 2020. Ombudsman. Diakses dari : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ombudsman. Pada 8 September 2019)

Digital Repository Universitas Jember

Pada tahun pertama perdamaian, komisaris tinggi Perancis memerintah Kaledonia Baru secara langsung. Pada tahun kedua, Kongres Teritorial dipilih, tetapi untuk memastikan penerapan perjanjian yang adil, negara Perancis diwakili di semua tingkat Pemerintah, mulai dari Kongres hingga layanan sipil. Tidak ada keputusan legislatif atau administratif yang luput dari pengawasan perwakilan Perancis.

Perancis bersikeras mempertahankan wilayah Pasifik Selatan ini, karena kontrolnya yang terus menerus terhadap Kaledonia Baru menjamin tempat di arena Pasifik. Kawasan Pasifik Selatan juga merupakan wilayah strategis bagi negara-negara besar dalam perebutan kekuasaan wilayah, mereka berhadapan satu sama lain yang mana Prancis memiliki keuntungan yakni lebih dekat dengan raksasa ekonomi yang tumbuh di Lingkar Pasifik. Batas lepas pantai 200 mil memberi Perancis akses ke sumber daya maritim dan mineral yang besar. Hal yang paling penting dari semuanya adalah program pengujian nuklir Perancis di Pasifik.

Presiden Mitterand mengatakan bahwa Perancis terus memberikan pengawasan di wilayah Pasifik hingga tahun 2000. FLNKS telah mengadopsi kebijakan Pasifik Bebas Nuklir, dan mempertahankan kontak dengan gerakan kemerdekaan anti-nuklir Polinesia Perancis. Perancis khawatir bahwa gerakan kemerdekaan yang sukses di Kaledonia Baru memiliki efek domino. Tenggelamnya kapal *Greenpeace* dengan nama *Rainbow Warrior* di Selandia Baru telah menunjukkan seberapa jauh Perancis bersedia pergi untuk melestarikan kehadiran nuklirnya di Pasifik.

Beberapa tahun sejak dilaksanakannya Referendum Pertama pada tahun 1987, Pemerintah Perancis menyatakan bahwa jumlah Suku Kanak memiliki 53 persen mayoritas dari penduduk di Kaledonia Baru; namun, proyeksi demografis di tahun 1991 menunjukkan bahwa mereka hanya menjadi 45 persen dari populasi pemilih (Donna, 1991). Mengingat bahwa sekitar 80 persen Suku Kanak mendukung front kemerdekaan (Donna, 1991), kecil peluang FLNKS memiliki mayoritas jelas yang diperlukan untuk memenangkan referendum. Dapat dibayangkan juga bahwa dalam 10 tahunmuncul kelas menengah Suku Kanak,

Digital Repository Universitas Jember

tergantung pada gaji dan subsidi Pemerintah. Kelompok ini sangat tidak menyukai kemerdekaan, yang memotong mereka dari dana Perancis.

Mayoritas orang Suku Kanak yang saat ini menentang kemerdekaan berasal dari Kepulauan Loyalitas, di mana upah yang diperoleh di ibukota wilayah memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Menggunakan asumsi bahwa, seandainya provinsi tersebut memilih untuk berpisah, wilayah tersebut dipastikan terpisah dan Provinsi Selatan tetap berada di Republik Perancis Hal ini membuat ekonomi masyarakat Provinsi Selatan semakin sejahtera dengan Perancis.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. PERSIAPAN REFERENDUM 4 NOVEMBER 2018

Pada bulan November 2018, komunitas teritorial Kaledonia Baru menentukan apakah menjadi mandiri sebagai sebuah negara atau tetap di bawah kedaulatan Perancis. Dengan kurang dari satu tahun pemungutan suara, ada detail yang belum diselesaikan, termasuk divisi jangka panjang tentang siapa yang berhak memilih. Hal ini adalah seri pertama dari tiga bagian yang mengeksplorasi berbagai aspek proses referendum, meneliti asal-usul histori referendum dan kompleksitas yang terkait dengan demokrasi penentuan nasib sendiri dalam konteks Kaledonia Baru. Kaledonia Baru, dianeksasi oleh Perancis pada tanggal 24 September 1853, secara resmi tetap menjadi koloni Perancis sampai integrasi ke republik pada akhir Perang Dunia Kedua. Warga negara Perancis diberikan hak pemungutan suara pada tahun 1946. Integrasi terhadap Kaledonia Baru menyebabkan Perancis secara sepihak menghapus wilayah dari Daftar PBB terhadap Wilayah Non-Pemerintah pada tahun 1947.

Pada tahun 1958, mayoritas pemilih di Kaledonia Baru memberikan suara dan mendukung sisa wilayah luar negeri di bawah Konstitusi baru Republik Kelima Perancis[18]. Namun, dalam serangkaian reformasi selama tahun 1960-an, Perancis mengembalikan otonomi teritorial yang dinikmati oleh Kaledonia Baru, meskipun ada protes dari politik RPCR[19] dan Pemerintah Perancis bersikeras pada universalitas kewarganegaraan Perancis dan hak-hak demokratis, dengan partai anti-kemerdekaan mendominasi institusi politik lokal di Kaledonia Baru (Robertson, 2017: 1). Tidak hanya populasi Suku Kanak yang merupakan

[18] Republik Kelima muncul dari runtuhnya Republik Keempat, menggantikan bekas republik parlementer dengan sistem presidensial, atau dual-eksekutif, yang membagi kekuasaan antara Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan seorang Presiden sebagai kepala negara. De Gaulle, yang merupakan Presiden Prancis pertama yang terpilih di bawah Republik Kelima pada bulan Desember 1958, percaya pada kepala negara yang kuat, yang digambarkannya sebagai perwujudan l'esprit de la nation ("semangat bangsa"). Sumber: Mimirbook. 2019. Republik Kelima Prancis. Diakses dari https://mimirbook.com/id/532b28c2e09 pada 23 Maret 2020

[19] Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) adalah partai Politik yang mendukung Perancis untuk tetap ada di Kaledonia Baru (Sumber : CIA. 2019. Political Parties and Leader : New Caledonia. Diakses dari : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/315.html. Pada 4 April 2020)

Digital Repository Universitas Jember

minoritas demografis, tetapi RPCR secara konsisten menunjukkan bahwa FLNKS tidak bisa berbicara atas nama semua orang Suku Kanak, tetapi proporsi yang tersisa telah diasumsikan mendukung Perancis. Hal ini karena kelompok anti kemerdekaan memberikan retorika politik yang seringkali kontras dengan yang seharusnya.

3.1 Pengaruh Partai Politik di Kaledonia Baru Terhadap Kesepakatan Referendum

Pada bulan Juli 1983, menteri Sosialis untuk luar negeri, Georges Lemoine, mengundang *Front Indépendantiste* FI[20], RPCR, dan partai sentris yang lebih kecil disebut Federasi untuk Masyarakat Kaledonia Baru *(Fédération pour une nouvelle société calédonienne)*, untuk menggelar musyawarah di Nainville-les-Roches. Pada akhir pembahasan, Pemerintah Perancis diakui untuk pertama kali atas hak bawaan dan aktif atas kemerdekaan orang Suku Kanak, dan keberadaannya dari realitas kolonial di Kaledonia Baru. Selanjutnya, Pemerintah Perancis menyetujui referendum di mana kemerdekaan menjadi salah satu opsi yang diusulkan. Namun, RPCR menolak untuk menerima ketentuan hak kemerdekaan dari sebagian populasi atau pembatasan hak untuk memilih. Perancis tetap menentang referendum kemerdekaan yang mengecualikan beberapa warga. Pada tahun 1987, Pemerintah konservatif Jacques Chirac menyelenggarakan pemungutan suara untuk kemerdekaan dengan persyaratan residensi tiga tahun, selanjutnya diboikot oleh FLNKS. Pada masa Pemerintah ini, terjadi pertumpahan darah selama bulan April hingga bulan Mei 1988 yang disebut krisis Ouvéa, yang menuntut agar terjadi persetujuan atas penyelesaian konflik politik pada masa tersebut.

FI sepakat bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri dicadangkan untuk orang-orang Suku Kanak dan mereka yang disebut sebagai "korban sejarah" dengan penjelasan bahwa mereka adalah keturunan asli yang telah turun temurun bermukin di Kaledonia Baru, narapidana dan buruh kontrak. Gagasan ini

[20] Front Internasional, merupakan partai Pro Kemerdekaan Kaledonia Baru yang terbentuk pada tahun 1979 (Sumber : CIA. 2019. Political Parties and Leader : New Caledonia. Diakses dari : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/315.html. Pada 4 April 2020)

Digital Repository Universitas Jember

menekankan pada pengalaman yang diceritakan mengenai penderitaan akibat penjajahan Perancis, membedakan antara komunitas non-pribumi sebelumnya, dan lebih banyak pada masyarakat metropolitan terbaru (Tjibaou 1996: 184). Untuk FI, berbagi penentuan nasib sendiri dengan 'korban sejarah' adalah konsesi sejak Deklarasi PBB tahun 1960 tentang pemberian kemerdekaan ke negara-negara dan masyarakat kolonial serta mengakui hak tentang penentuan nasib sendiri untuk 'masyarakat yang terjajah'. Namun, banyak orang non-Suku Kanak dengan jelas menolak penggambaran sebagai korban, sementara harus diakui mereka sendiri juga kontribusi untuk pengembangan bagi Kaledonia Baru.

Pemerintah Perancis dan RPCR menolak untuk menerima Permintaan FI yaitu tentang pembatasan hanya untuk mereka yang memiliki setidaknya satu orangtua yang lahir di Kaledonia Baru. Selama masa ini, Perancis mempertahankan dekolonisasi itu hanya bisa terjadi dalam kerangka kerja Konstitusi Perancis. Tetapi FLNKS berhasil melobi negara-negara Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, dan akhirnya diperoleh dukungan Australia dan Selandia Baru untuk menuliskan kembali New Caledonia pada Daftar Wilayah Non - Pemerintah Sendiri PBB di Indonesia pada tahun 1986, meskipun ada protes dari Perancis. Hal itu memberi tekanan pada Perancis untuk menghormati penentuan nasib sendiri orang Suku Kanak sebagai 'Orang yang dijajah', tanpa menetapkan kemerdekaan sebagai satu-satunya hasil akhir.

Populasi Pribumi yakni Suku Kanak menurun dari 48% pada tahun 1963 menjadi 42% pada tahun 1976 dari total wilayah (ISEE, 2017). Pemerintah Perancis mulai aktif dan lebih berhati-hati dalam melakukan migrasi serta penyelesaian diplomatik sebagai sarana untuk memperkuat kedaulatan Perancis atas wilayah koloninya. Hal ini didasari bahwa wilayah tetangga, yakni Melanesia sedang mempersiapkan kemerdekaan dan Perancis mendapatkan banyak kritikan dari berbagai negara penentang program nuklir karena Perancis sedang meningkatkan program pengujian nuklirnya di Polinesia Perancis. Seruan untuk kemerdekaan mulai muncul di akhir tahun 1960-an, terutama di kalangan mahasiswa yang condong ke kiri, kebanyakan Suku Kanak yang radikal.

Digital Repository Universitas Jember

Pada tahun 1976, beberapa kelompok yang terdiri dari mahasiswa berhaluan kiri dan Suku Kanak asli, membentuk Partai Pembebasan Suku Kanak *(Parti de libération Suku Kanak)*, sedangkan UC[21] segera menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan. Sebagai tanggapan, banyak orang non-pribumi meninggalkan UC, dan Jacques Lafleur mengumpulkan pemilih anti-kemerdekaan di bawah *Rassemblement pour la Calédonie dans la République* (RPCR). Pada tahun 1981, beberapa pihak dari kelompok pro kemerdekaan membentuk Front Internasional (*Front Indépendantiste*), yang kemudian bertransformasi lebih besar membentuk Front Pembebasan Nasional Sosialis Suku Kanak (*Front de Libération Nationale Suku Kanak et Socialiste)* (FLNKS) pada tahun 1984.

RPCR dan Pemerintah Perancis bersikeras pada universalitas kewarganegaraan Perancis dan hak-hak demokratis. Tidak hanya populasi Suku Kanak yang merupakan minoritas demografis, tetapi RPCR secara konsisten menunjukkan bahwa FLNKS tidak bisa berbicara atas nama kepentingan semua orang Suku Kanak, tetapi juga proporsi penting yang mendukung seperti pemilih Perancis yang tersisa. Pada bulan Juli 1983, menteri Sosialis untuk luar negeri, Georges Lemoine, mengundang FI, RPCR, dan partai sentris yang lebih kecil disebut Federasi untuk Masyarakat Kaledonia Baru *(Fédération pour une nouvelle société calédonienne)*, untuk berbicara di *Nainville- les-Roches*[22].

The Matignon-Oudinot Accords - ditandatangani oleh Jean-Marie Tjibaou dari FLNKS dan Jacques Lafleur dari RPCR, dan disetujui oleh referendum nasional pada tanggal 6 November 1988[23]. Keputusan itu menempatkan struktur kelembagaan politik yang baru dan berfokus pada penyeimbangan kembali secara geografis serta pengembangan ekonomi di wilayah Suku Kanak. Meskipun

[21] Uni Caledonian partai adalah pro-kemerdekaan dan partai politik tertua di Kaledonia Baru (Sumber : CIA. 2019. Political Parties and Leader : New Caledonia. Diakses dari : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/315.html. Pada 4 April 2020)

[22] Sebuah desa (komune) yang berada di sebelah utara Perancis (Sumber : Collinsdictionary. 2017. Nouvelle Calédonie. Diakses dari https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nouvelle-caledonie. Pada 3 April 2020)

[23] Perjanjian ini menetapkan periode pembangunan selama 10 tahun ke depan sehingga memberi kekuatan ekonomi dan kelembagaan bagi rakyat Kanak. Selama 10 tahun rakyat Kaledonia Baru sepakat tidak mengangkat isu kemerdekaan. (David Broustet, Pascal Rivoilan. 2009. Recensements de la population, Population Census, 2008 and 2009. Diakses dari Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1560282. Pada 7 Mei 2020)

Digital Repository Universitas Jember

menjadi pilihan nasional, sedikit lebih dari sepertiga pemilih yang memenuhi syarat yang ditetapkan Perancis untuk berpartisipasi, mencerminkan relatif kurangnya minat di luar negeri. Pada Kaledonia Baru, hanya 57% pemilih menyetujui kesepakatan, dengan jumlah besar pada kedua belah pihak memunculkan pandangan skeptis terhadap pengaturan tersebut (JORF, 1988). Memang, keputusan yang dibuat oleh Tjibaou dalam perjanjian *The Matignon-Oudinot* akhirnya membuat rugi; ia ditemukan terbunuh pada tanggal 4 Mei 1989.

Kesepakatan mendorong kembali referendum tentang kedaulatan penuh hingga tahun 1998. Kelayakan untuk memilih didasarkan pada kelayakan untuk referendum tahun 1988, secara konstitusional disebut sebagai 'populasi yang bersangkutan'. Namun, referendum tidak pernah terjadi pada tahun 1998. Sebaliknya, Perjanjian Noumea, yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1998, setuju untuk ditunda ke antara tahun 2014 dan tahun 2018, dimotivasi oleh kekhawatiran sebuah referendum dapat memarginalkan sebagian besar populasi dan memicu terulangnya kekerasan seperti pada satu dekade sebelumnya

. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa mereka yang memiliki usia minimum 20 tahun secara residensial pada tanggal 31 Desember 2013 memenuhi syarat untuk berpartisipasi (Australia National University, 2017). Aspek-aspek utama referendum tentang kemerdekaan di Kaledonia Baru, yang secara resmi disebut 'konsultasi' dalam Kesepakatan Noumea. Hal ini mempertimbangkan pertanyaan mengenai referendum, waktu dan masalah menjadi persoalan dalam hal kelayakan. Meskipun poin-poin ini sampai batas tertentu tercakup dalam sebuah peraturan di Kaledonia baru yang menerapkan Kesepakatan Noumea pada tahun 1998, banyak detail yang masih belum diputuskan dan secara aktif dipertentangkan oleh para pemimpin politik lokal.

Referendum adalah suatu bentuk demokrasi langsung dimana rakyat diminta untuk memberikan suara langsung pada isu atau kebijakan utama. Menurut hukum internasional, adalah mekanisme dimana masyarakat secara demokratis melakukan pencegahan sendiri. Menurut pertauran dari konstitusi Perancis, 'konsultasi' mengacu pada referendum yang dibatasi untuk komunitas

Digital Repository Universitas Jember

teritorial luar negeri yang diberikan kewenangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi (negara) atau kekuasaannya.

Pada bulan Desember 2017, Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe mengunjungi Kaledonia Baru dan menguraikan peta jalan mengenai konsultasi referendum, meyakinkan para pemimpin bahwa hal itu pasti terjadi. Pada bulan Maret 2018, Pemerintah Perancis membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang yang dipilih oleh, dan dari antara, dewan kongres legislatif Kaledonia Baru Kongres dibentuk untuk bekerja pada empat tema yaitu implementasi Kesepakatan Noumea, pengalihan kekuasaan yang berdaulat, tempat Kaledonia Baru di tatanan dunia Internasional, dan nilai-nilai umum masyarakat Kaledonia Baru dan lembaganya. Pemerintah Perancis juga mengumumkan pembentukan kelompok yang diambil dari sekelompok tokoh lokal yang sangat dihormati, sekelompok orang bijak, beberapa diambil dari berbagai bagian masyarakat sipil Kaledonia Baru seperti gereja dan organisasi nirlaba. Kelompok tersebut bertanggung jawab 'mengawasi tema-tema kampanye untuk memastikan mereka tidak melukai masyarakat Kaledonian dengan melanggar nilai-nilainya '(Filipi, 2017).

Perjanjian Noumea menyatakan bahwa Kaledonia Baru memiliki kekuatan berdaulat, akses ke status internasional yang memiliki tanggung jawab penuh dan organisasi kewarganegaraan ke dalam kebangsaan (sebagai referendum). Referendum ditentukan untuk mentransfer lima 'kekuatan berdaulat', (1) pertahanan, (2) urusan luar negeri, (3) mata uang, (4) keadilan, (5) hukum dan ketertiban. Kaledonia Baru, yang telah 'berbagi kedaulatan' dengan Perancis dan menjadi bagian dari Republik Kelima Perancis, menyetujui kedaulatan penuh dan menjadi bagian pertama dari Republik Kelima Perancis yang memisahkan diri sejak Djibouti (Negara di wilayah Tanduk Afrika) pada tahun 1977 di Republik Keempat[24].

[24] Republik Keempat Prancis (Perancis : La Quatrième République Française) adalah pemerintah republik Perancis antara tahun 1946 dan 1958, diperintah oleh konstitusi republik keempat. Republik Keempat berpaku pada era pertumbuhan ekonomi yang besar di Prancis dan pembangunan kembali institusi sosial dan industri negara setelah Perang Dunia II, melalui bantuan yang diberikan Amerika Serikat melalui Marshall Plan. Sumber : Ron, Raymond. 1960. *France Steadfast and Changing: The Fourth to the Fifth Republic*. Harvard University Press

Digital Repository Universitas Jember

Perdana Menteri Philippe mengindikasikan selama kunjungannya bahwa perlu untuk menghormati norma-norma internasional dan nasional, menyiratkan 'upaya yang dilakukan untuk penyederhanaan sehingga 'tidak ambigu dan dapat dimengerti'. Pemerintah multi-partai Kaledonia Baru bersama dengan Kongres memiliki tanggung jawab untuk menyetujui pertanyaan yang tertera pada pemilihan mengenai referendum, pemerintah Prancis secara resmi mengeluarkan keputusannya selambat-lambatnya empat minggu sebelum referendum dilaksanakan (Robertson, 2018: 1).

Kesepakatan tersebut menunda kesepakatan referendum tahun 1998 tentang independensi hingga antara tahun 2014 dan tahun 2018, bertepatan dengan masa keempat Kongres Kaledonia Baru (dipilih setiap lima tahun), dan tanggal yang tepat dapat ditentukan oleh mayoritas tiga per lima dari majelis itu. Referendum ini dilaksanakan pada November 2018.

3.2 Penentuan Peserta Referendum Kaledonia Baru

Pihak yang dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara tetap merupakan masalah yang paling menyusahkan karena secara langsung berdampak pada hasil yang dapat melegitimasi. Dalam perubahan konstitusional utama, Persetujuan melengkapi daftar pemilih umum yang terdiri dari semua warga negara Perancis. Daftar pemilih tersebut termasuk juga dua daftar pemilih khusus, yakni satu untuk pemilihan majelis provinsi dan Kongres (dikenal sebagai warga negara Kaledonia Baru), dan yang lainnya untuk konsultasi, yang masing-masing memiliki kriteria memiliki kelayakan yang berbeda. Sejak perjanjian, telah ada kesepakatan umum, meskipun tidak dengan suara bulat, tentang pembatasan dan kriteria peserta pemilihan umum meskipun pembahasan ini tidak rinci.

Konsultasi untuk pembatasan pemungutan suara pertama kalinya disetujui dalam Kesepakatan *Matignon-Oudinot* pada tahun 1988. Kesepekatan menentukan populasi dalam pemungutan suara, populasi yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan tersebut didefinisikan sebagai mereka yang ada dalam daftar pemilihan lokal pada tahun 1988 beserta keturunan mereka Hal ini juga menyebutkan persyaratan untuk pendaftaran yang tercantum pada Undang-

Digital Repository Universitas Jember

Undang Organik Pasal 218, seperti kelayakan untuk konsultasi pada tahun 1998; memiliki status adat, tempat lahir dan koneksi atas wilayah tersebut; dan yang paling penting bagi imigran yaitu tempat tinggal tetap di Kaledonia Baru sejak akhir tahun 1994. Pada pertengahan tahun 2017, dari sekitar 180.000 warga Perancis dalam daftar pemilihan, hampir 158.000 berada di daftar pemilih khusus untuk referendum (*La Liste Spéciale Pour Le Référendum* atau LESC), yang berarti bahwa 13% orang dalam daftar umum saat ini dikecualikan jika merujuk pada Perjanjian Matignon dan Undang-Undang Organik (UN, 2017).

Pendaftaran di LESC mengharuskan individu untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi baik persyaratan tempat tinggal atau salah satu dari tujuh syarat lain yang tercantum. Namun, partai-partai pro-kemerdekaan berargumen ini mengecualikan sebagian besar keturunan Suku Kanak geenrasi muda karena prosedur administrasi yang sulit. Memang, banyak Suku Kanak absen dari daftar pemilihan umum juga. Menurut *Rassemblement indépendantiste et nationaliste*[25] (RIN) 25.000 pemilih dari Suku Kanak hilang dari daftar pemilihan referendum (Robertson, 2018: 2), yang mereka berpendapat dibenarkan pendaftaran otomatis orang dengan status adat, secara eksklusif dipegang oleh Suku Kanak. Hal ini dipandang sebagai penolakan oleh pihak anti-kemerdekaan sebagai diskriminasi tidak adil.

Suatu pengaturan kompromi juga dibuat, yaitu secara otomatis mendaftarkan 11.000 'penduduk asli' yang lahir di Kaledonia pada daftar pemilihan umum. Hal ini diperlukan untuk mendaftarkan secara otomatis pada daftar referendum, di mana 7000 nama harus memiliki status adat (Robertson, 2018: 2). Meskipun gerakan pro-kemerdekaan sebagian besar mendukung langkah tersebut, Partai Buruh menegaskan bahwa semua Suku Kanak harus secara otomatis terdaftar, jika tidak hal ini dapat meningkatkan terjadinya boikot referendum. Pengecualian Suku Kanak atau non-partisipasi memiliki pengaruh signifikan dalam hasil referendum. Berbagai perdebatan yang telah muncul di

[25] Kelompok pendukung dan nasionalis pro-kemerdekaan (Sumber : Sumber : CIA. 2019. Political Parties and Leader : New Caledonia. Diakses dari : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/315.html. Pada 4 April 2020)

Digital Repository Universitas Jember

atas, diputuskan bahwa untuk menentukan persyaratan agar terdaftar di LESC sebagai pemilih pada referendum (Lecas, 2018) yakni :

1. Pendaftaran pada daftar pemilih khusus untuk referendum, harus sesuai dengan Perjanjian Nouméa 1998 (apabila memenuhi persyaratannya tetapi tidak terdaftar, maka wajib untuk melapor ke petugas LESC)
2. Lahir di Kaledonia Baru dan terdaftar dalam daftar pemilihan khusus untuk provinsi (LESP)
3. Bertempat tinggal di Kaledonia Baru untuk secara berkelanjutan selama 20 tahun
4. Lahir sebelum 1 Januari 1989 dan tinggal di Kaledonia Baru dari 1988 hingga 1998
5. Dilahirkan setelah 1 Januari 1989 dengan orang tua yang ikut atau telah terdaftar dalam daftar pemilih khusus untuk referendum Perjanjian Nouméa 1998 (atau yang memenuhi persyaratannya tetapi tidak terdaftar)
6. Lahir di Kaledonia Baru dengan tiga tahun tinggal terus menerus (sebelum 31 Agustus 2018).

Persyaratan di atas sebenarnya di buat untuk membatasi jumlah imigran, penduduk berdarah campuran dan imigran dari Perancis agar tidak terdaftar, namun nyatanya gelombang imigran datang dengan besar sejak perjanjian Noumea ditetapkan dan peraturan berikutnya (seperti pada poin ke 3 hingga 6) menguntungkan kelompok anti kemerdekaan. Terlepas dari kepastian yang terus-menerus dari Pemerintah Perancis mengenai komitmennya untuk menjamin integritas konsultasi, para politisi lokal telah mengkritik perannya karena berbagai alasan. Para pemimpin anti-kemerdekaan menuduh kelompok pro-kemerdekaan melakukan kelalaian dan gagal mengartikulasikan pandangan pilihannya, sementara para pemimpin pro-kemerdekaan menuduh kelompok anti kemerdekaan gagal memastikan bahwa seluruh orang Suku Kanak harus terdaftar. Para pemantau PBB telah mengunjungi wilayah tersebut selama dua tahun terakhir dan mengamati sejumlah kekurangan dalam proses pendaftaran yang

Digital Repository Universitas Jember

diawasi oleh Pemerintah kota setempat di bawah kendali Pemerintah Perancis (PBB 2017).

Menyoroti gawatnya situasi menyangkut daftar pemilih, Pemerintah Perancis meminta bantuan atlet judo yang merupakan “tokoh masyarakat” pemenang medali emas Olimpiade Perancis yang terkenal, Teddy Riner, untuk menghadiri acara-acara pemuda. Ia ditugaskan untun memberikan dorongan kepada kelompok pemuda untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam referendum. Sementara kedua pihak yang pro dan anti-kemerdekaan secara luas menyetujui cetak biru yang diajukan oleh Pemerintah Perancis. Namun demikian masih ada rintangan yang signifikan untuk diatasi sebelum pemungutan suara, di atas semua memastikan bahwa jalur yang berbeda di masa depan dipahami dengan baik oleh publik.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 5. KESIMPULAN

Komposisi imigran yang ada di suatu negara ternyata dapat menimbulkan efek politik, seperti di Kaledonia Baru. Dapat dipahami bahwa ada tiga kelompok politik di Kaledonia Baru, pertama, kelompok pro kemerdekaan (FLNKS), kelompok anti kemerdekaan (terdiri dari kolonial Perancis) dan kelompok imigran (terdiri dari warga yang berasal dari negara Wallis dan Futunian, Tahitian, Indonesia, Vietnam, ni-Vanuatu, dan sebagainya). Pada berbagai momen politik, kelompok yang vis-a-vis adalah kelompok pro kemerdekaan dan kelompok anti kemerdekaan. Sebagai salah satu dari negara Kepulauan yang di koloni oleh Perancis, jumlah masyarakat Eropa yang menduduki wilayah Kaledonia Baru dan menjadi "warga negara" hingga saat ini mencapai hampir setengah dari jumlah penduduk asli. Meskipun penduduk asli Kaledonia Baru juga dalam sejarahnya juga merupakan warga negara kepulauan yang bertempat terlebih dahulu di "tanah" Kaledonia Baru. Warga negara Eropa yang juga bagian dari kolonialisme mempunyai kekuatan yang besar dari seluruh sektor negara di Kaledonia Baru, terutama kekuatan politik. Hal ini agar sistem Kolonial yang dijalankan oleh Perancis tetap dapat berjalan.

Pada pelaksanaan referendum tanggal 4 November 2018, suara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok anti kemerdekaan memenangkan keputusan agar Kaledonia Baru tetap menjadi negara Koloni Perancis. Kemenangan dua kelompok tersebut bukan tanpa sebab, karena masyarakat Eropa yang tinggal Kaledonia Baru tentu mengatakan "Tidak" pada kemerdekaan Kaledonia Baru. Suara kelompok ini, mempengaruhi kelompok imigran lainnya, karena kelompok imigran terdiri dari pekerja yang tentu saja dipekerjakan oleh Perancis. Ketergantungan dan orientasi kelompok imigran dari segi ekonomi ini telah cukup ampuh menjadikan kemenangan untuk kelompok anti-kemerdekaan (di dominasi kelompok dari masyarakat Eropa).

Digital Repository Universitas Jember

Kelompok pro-kemerdekaan yang di dominasi oleh penduduk asli Kaledonia Baru atau Suku Suku Kanak hingga referendum terakhir tahun 2018, masih tetap gigih menjalankan misi utama untuk merdeka. Mereka memandang hasil referendum tersebut secara optimis, dan membandingan hasil ini dengan referendum tahun 1998, dengan anggapan bahwa kelompok pro-kemerdekaan hanya kalah dengan selisih yang sedikit dengan kelompok anti kemerdekaan.

Pertarungan dan kekalahan lebih dari satu kali yang dialami oleh kelompok pro-kemerdekaan ini, nampaknya juga mempengaruhi secara tidak langsung atas kondisi psikososial dan rasional mereka. Kolonisasi oleh Perancis secara psikososial telah membawa Kaledonia Baru menjadi tempat yang lebih "maju" secara sosial dan budaya, karena mampu terhubung dengan masyarakat internasional secara langsung, warga asli disana juga mendapatkan "pendidikan" dari kaum Perancis. Adanya penyatuan budaya, rentang waktu yang lama berjalan, ini menyebabkan sebagian Kelompok pro-kemerdekaan beranggapan bahwa memang Kolonisasi merupakan hal yang menguntungkan, ditambah lagi dengan faktor rasional bahwa Kaledonia Baru sejak dahulu telah di Koloni oleh Perancis. Tetapi sumber daya alam yang dimiliki tidak secara berdaulat dikelola oleh masyarakat asli Kaledonia Baru, sehingga status quo keamanan perekonomian negara selama ini terjamin dengan pengaturan yang dijalankan dari kolonisasi Perancis.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih*. Pustaka Eureka Surabaya.

Bandur, A. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mas'oed, M. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES

Mujani, Saiful R., Willian Liddle, K. A. 2012. *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan. Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. (R. Sikumbang, Ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.

Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (T. Chandra, Ed.). Sidoarjo: ZIFATAMA PUBLISHING.

Ron, Raymond. 1960. *France Steadfast and Changing: The Fourth to the Fifth Republic*. Harvard University Press

Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Burhanuddin. 2015. *Dinamika Negara-Negara Teritori Asing di Kawasan Pasifik Barat Daya*. *KRITIS, Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol.1/02*. Dipetik dari: http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/download/12/12. Pada 18 Juni 2019

David C. 2019. *The road to sovereignty for New Caledonia ? Analysis of the November 2018 con- sultation on self-determination.* Small States and Territories Journal, University of Malta.

Fisher, D. 2013. France's engagement in the region from the 1990s: France, its collectivities, the European Union and the region. In France in the South Pacific: Power and Politics. ANU Press. Diakses dari: from www.jstor.org/stable/j.ctt31ngqm.13. Pada 8 Agustus 2019

Digital Repository Universitas Jember

Fisher, D. 2019. *New Caledonia's independence referendum: Local and regional implications*. Diakses dari Lowy Institue: https://www.lowyinstitute.org/publications/new-caledonia-s-independence-referendum-local-and-regional-implications Pada 30 Mei 2020

Fraser, H. 1988. *New Caledonia: Anti-colonialism in a Pacific Territory.* Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian National University.

Hooper, A. 2008. Tokelau: A sort of 'self-governing' sort of 'colony.' *The Journal of Pacific History.*

Ibrahim, H. 1984. Referendum Adalah Pemilihan Umum Dalam Bentuk Lain. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol14.no5.1084

Korson, C.A.K. 2015. *MAPPING NARRATIVES OF SELF-DETERMINATION, NATIONAL IDENTITY, AND (RE)BALANCING IN NEW CALEDONIA.* Kent State University. Diakses dari http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=kent1443154738. Pada 3 Maret 2020.

Saussol, A. 1985. *La terre et la confrontation des hommes en Nouvelle-Calédonie.* Les Temps Modernes.

Saussol, A. 1990. *Nouvelle-Calédonie: le choc d'une colonisation singulière*. In Bensa et al., eds. Comprendre l'identité Suku Kanak. Paris: Centre Thomas Moore.

Trihartono, A. 2014. Kuasa Rakyat Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru by Saiful Mujani, William R. Liddle, and Kuskridho Ambardi. *Social Transformations: Journal of the Global South, 2*(2),. https://doi.org/10.13185/ST2014.02206 diakses dari : https://www.researchgate.net/profile/Agus_Trihartono/publication/3078688_Kuasa_Rakyat_Analisis_Tentang_Perilaku_Memilih_dalam_Pemilihan_Legislatif_dan_Presiden_Indonesia_Pasca_Orde_Baru_by_Saiful_Mujani_William_R_Liddle_and_Kuskridho_Ambardi/links/5bf764e2458515a69e34b20e/Kuasa-Rakyat-Analisis-Tentang-Perilaku-Memilih-dalam-Pemilihan-Legislatif-dan-Presiden-Indonesia-Pasca-Orde-Baru-by-Saiful-Mujani-William-R-Liddle-and-Kuskridho-Ambardi.pdf?origin=publication_detail/. Pada 29 Mei 2019

Digital Repository Universitas Jember

Artikel

Australian Indigenous Law Reporter. 2002. *"Noumea Accord - Digest"* . diakses dari : http://www.austlii.edu.au/au/journals/AILR/2002/17.html. Pada 8 Februari 2020

Australian National University. 2017. *France in the South Pacific.* Diakses dari Australian National University http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p241101/html/CH04.xhtml?referer=217&page=13 Pada 7 Mei 2020

Courtial, J dan Soucramanien, F, M. 2013., *"Réflexions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie",* Paris: Rapport au Premier Ministre, 2013, https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/134000711.pdf. Pada 30 Mei 2020

Kircher, I. 1986. *The Suku Kanaks of New Caledonia. Minority Rights Group Report No. 71*. London: Minority Rights Group.

McInnes, G. 2014. *Scottish Independence Referendum 2014, Analysis of results. Research Paper 14/50, House of Commons Library*. Diakses dari: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU2L3phq3kAhXszIUKHeXAB38QFjAPegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fresearchbriefings.files.parliament.uk%2Fdocuments%2FRP14-50%2FRP14-50.pdf&usg=AOvVaw0X9gDKm3Um8e6VSt_0suxV. Pada 30 Mei 2020

UNHCR. 2017. *Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi.* Diakses dari https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf. Pada 7 September 2019.

United Nations. 2006. Role Of Administering Powers In Decolonization Process Discussed In Second Meeting Of Pacific Regional Seminar. Diakses dari : https://www.un.org/press/en/2006/gacol3149.doc.htm. Pada 4 Maret 2019

United Nations. 2017. Revision de la liste electorale pour l'election des membres du Congrès et des assemblees de province de la Nouvelle-Calédonie (LESP) et de la liste electorale speciale pour la consultation (LESP). Nouméa: United Nations. Diakses dari : www.nouvelle caledonie.gouv.fr/content/download/3694/28853/file/NC%202017-LS Rapport%20Experts%20UN.pdf. Pada 4 Maret 2019

United Nations. 2019. International Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories 25-31 May. Diakses dari: https://www.un.org/en/observances/non-self-governing-week. Pada 28 Mei 2020

Digital Repository Universitas Jember

Internet

Axl.cefan. 2013. *Code de l'indigénat*. Diakses dari : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/indigenat_code.htm. Pada 21 Januari 2020

BBC. 2014. *Scottish referendum: Scotland votes 'No' to independence*. https://www.bbc.com/news/uk-scotland-29270441. Pada 12 Juni 2020

Borgatta, E. F., & Montgomery, R. J. V. 2000. *Encyclopedia of Sociology* (2nd ed.). New York: MacMillan Reference USA. Dipetik dari http://download.library1.org/main/22000/6a57453114aca7606bea0a092eac47dd/.pdf. pada 12 April 2019

Catherine Ris, Alain Trannoy, Étienne Wasmer. 2017. The New Caledonian Economy Beyond Nickel. Diakses dari : https://www.cairn-int.info/article-E_NCAE_039_0001--the-new-caledonian-economy-beyond.htm. Pada 27 November 2020

CIA World Factbook. 2018. *Introducing New Caledonia*. Diakses dari : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_nc.html. Pada 6 April 2020)

CIA World Factbook. 2019. *New Caledonia*. Diakses dari : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nc.html. Pada 3 juli 2020

CIA. 2019. *Political Parties and Leader : New Caledonia*. Diakses dari : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/315.html.Pada 4 April 2020

CNN Indonesia. 2018. *Ingin Lepas Dari Perancis, Kaledonia Baru Gelar Referendum.* Diakses dari CNN Indonesia : https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181102180416-113-343586/ingin-lepas-dari-Perancis-kaledonia-baru-gelar-referendum. Pada 10 Juni 2019

Collinsdictionary. 2017. *Nouvelle Calédonie.* Diakses dari https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nouvelle-caledonie. Pada 3 April 2020

David Broustet, Pascal Rivoilan. 2009. *Recensements de la population, Population Census, 2008 and 2009.* Diakses dari Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1560282. Pada 7 Mei 2020

David Broustet, Pascal Rivoilan. 2009. *Recensement de la population en Nouvelle-Calédonie en 2009*. Diakses dari Institut de la statistique et des

Digital Repository Universitas Jember

études économiques de Nouvelle-Calédonie https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281138 Pada 7 Mei 2020

Donna W. 1989. France's Development Plans for New Caledonia. Diakses dari : culturalsurvival.org : https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/frances-development-plans-new-caledonia. Pada 12 Juli 2020

Donna W. 1991. *Land and Independence in New Caledonia.* Diakses dari : https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/land-and-independence-new-caledonia. Pada 11 Februari 2020

Eldridge, A.2016. *What's The Difference Between A Migran and A Refugee*. Diakes dari: https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-a-migrant-and-a-refugee. Pada 11 Juni 2020

Election NC. 2018. *La liste électorale spéciale consultation*. Diakses dari : https://www.elections-nc.fr/les-listes-electorales/les-3-listes-electorales/la-lesc. Pada 7 Juni 2019)

Elections-nc.fr. 2018. *Les résultats.* Diakses dari : https://www.elections-nc.fr/referendum-2018/les-resultats. Pada 18 Desember 2018

Fatimah, N. 2019. *Referendum: Pengertian, Jenis, Hingga Peraturan Pelaksanaannya.* Diakses dari https://pelayananpublik.id/2019/09/11/referendum-pengertian-jenis-hingga-peraturan-pelaksanaannya/. Pada 11 Juni 2020

Fineman, M. 1988. *15 Melanesians Killed in New Caledonia Assault : Bloody Rescue From "Sacred" Cave Told.* Diakses dari LA Times : https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-05-06-mn-2981-story.html. Pada 18 Mei 2019

Fisher, W. 2018. *New Caledonia's Independence Referendum.* Diakses dari Australian Institute of International Affairs: http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/new-caledonias-independence-referendum/ . Pada 30 Mei 2020

Foster, S,. Shineberg, D. L. 2019. *New Caledonia*. Diakses dari Encyclopædia Britannica : https://www.britannica.com/place/New-Caledonia-French-unique-collectivity-Pacific-Ocean. Pada 10 Mei 2020

Heywoods, A. 2002. *Politics : Second Edition*. New York: PALGRAVE MACMILAN. Diakses dari : http://www.kolegji-juridica.org/new_web/wp-content/uploads/2017/04/Andrew-Heywood-Politics-Second-Edition-Palgrave-Foundations-S.-Palgrave-Macmillan.pdf. Pada 8 Juli 2019

Digital Repository Universitas Jember

KBBI Daring. 2016. *Imigran*. Diakses dari : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/imigran. Pada 11 Juni 2020

KBBI Daring. 2020. *MDPL*. Diakses dari : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mdpl. Pada 4 Maret 2019

KBBI Daring. 2020. *Ombudsman*. Diakses dari : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ombudsman. Pada 8 September 2019

Kemlu.go.id. 2014. *Kaledonia Baru*. Diakses dari : https://www.kemlu.go.id/noumea/id/Pages/Kaledonia-Baru.aspx. Pada 29 November 2019

Moody Analytic's. 2017. New Caledonia – Labor Force Diakses dari : https://www.economy.com/new-caledonia/labor-force. Pada 27 November 2020

Naylor, E. (Ed.). 2018. *France" s Modernising Mission: Citizenship, Welfare, and the End"s of Empire*. Portsmouth: PALGRAVE MACMILAN. Diakses dari :http://download.library1.org/main/2181000/a554b50fdfc90c615e35d5ca5675478c/(St Anton y&#x27_s Series) Pada 6 April 2019

Nouvelle Caledonie Pacific Heart. 2015. Passport, visa and customs. Diakses dari : https://www.newcaledonia.travel/en/passport-visa-customs. Pada 3 Juli 2020

Pireport.org. 1998. *Noumea Accord*. Dipetik dari: http://www.pireport.org/articles/1998/05/12/noum%C3%A3%C2%89-accord. Pada 3 Maret 2019

Pireport.org. 2016. *New Caledonia, French Leaders Look To Finalize Plans For 2018 Referendum*. Diakses dari : http://www.pireport.org/articles/2016/11/07/new-caledonia-french-leaders-look-finalize-plans-2018-referendum. Pada 15 Januari 2019

Pison, G. 2014. *Negara Mana yang Punya Paling Banyak Imigran*. Diakses dari theconversation.com : https://theconversation.com/negara-mana-yang-punya-paling-banyak-imigran-114013. Pada 11 Juni 2020

Pitoiset, A. 2014. *New Caledonia. Maison De La Nouvelle-Calédonie.* Diakses dari : http://www.mncparis.fr/ulftp/mnc_general_uk.pdf. Pada 2 Desember 2018

Robertson, S. 2017. *The New Caledonian Referendum on Independence Part 1 : Historical Origins. Brief, 40(Building 20 Years of The Stat, Society,& Goverment in Melanesia Program), 2.* Diakses dari : http://bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2017-12/dpa_ib2017_40_robertson.pdf. Pada 2 Desember 2018

Digital Repository Universitas Jember

Robertson, S. 2018. *The New Caledonian Referendum on Independence (Part 2): The Vote*. Departmen of Pacific Affairs. Australian National University. https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/141945. Hal.2. Pada 10 Juni 2020

United Nation. (1960). *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries - Gathering a body of global agreements.* Diakses dari from http://www.un-documents.net/a15r1514.htm. Pada 25 Januari 2019

VOA. 2018. *In New Caledonia Independence Vote Turnout High, Results Trickle in*. Diakses dari :https://www.voanews.com/east-asia-pacific/new-caledonia-independence-vote-turnout-high-results-trickle. Pada 30 Mei 2020